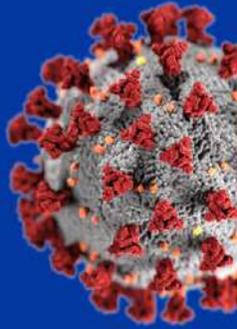


Mulia Ardi

Mulia Ardi

EPISTEMOLOGI RESPON PUBLIK
TERHADAP PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID 19)



EPISTEMOLOGI RESPON PUBLIK TERHADAP PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

EPISTEMOLOGI RESPON PUBLIK
TERHADAP PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID 19)



Alim's Publishing Jakarta

Alim's Publishing Jakarta

**EPISTEMOLOGI RESPON PUBLIK
TERHADAP PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

Mulia Ardi

Alim's Publishing

Jakarta

2021

{i}

Epistemologi Respon Publik terhadap Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Penerbit : Alim's Publishing Jakarta – Juni 2021

NO ISBN : 978-623-6681-27-5

Penulis : Mulia Ardi
Editor : Agung Prasetyo
Layout Isi : Agung Prasetyo
Cetakan : Pertama

Diterbitkan oleh :

Alim's Publishing Jakarta

Jl. Waru no. 15 Rawamangun Jakarta Timur

Email: mauludiali94@yahoo.co.id (Hp 0877565773840)

Website : www.alimpublishing.com(Hp. 081384086640)

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam
bentuk apapun secara elektronik maupun
mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit



Penerbit
Alim's Publishing
Jl. Waru No: 15
Rawamangun – Jakarta Timur

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melapangkan jalan bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, Insan mulia yang membawa kita menuju jalan kebenaran.

Pandemi Covid-19 yang terindikasi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini belum menampakkan titik akhir. Pemerintah telah mengupayakan beragam cara guna mencegah dan mengantisipasi persebaran Covid-19. Namun upaya ini belum membuahkan hasil signifikan. Penularan Covid-19 sampai dengan hari ini masih terus terjadi dan meningkat tajam di sejumlah daerah di Indonesia.

Masalah utama yang dihadapi upaya penanganan Covid-19 adalah *trust* (kepercayaan) publik kepada pemerintah. Kegamangan pemerintah dalam merespon Covid-19 menimbulkan *distrust* (ketidakpercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Publik pun terpecah dalam menanggapi dan menyikapi pandemi Covid-19. Situasi ini tentu berdampak negatif bagi upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19 karena penanganan Covid-19 pada prinsipnya membutuhkan kerjasama aktif dan produktif dari dua belah pihak, yakni pemerintah dan masyarakat.

Telaah epistemologi atas respon publik dalam menanggapi pandemi Covid-19 ditujukan untuk mengungkap latar dan asumsi di balik reaksi dan respon masyarakat terhadap pandemi. Pandemi Covid-19 memerlukan penanganan yang komprehensif melalui sejumlah pertimbangan, salah satunya pertimbangan epistemologi. Pendekatan yang tepat berdasar pertimbangan epistemologis diharapkan mampu menjadi solusi alternatif bagi upaya penanganan Covid-19.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu terselesaikannya buku ini. Kami menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi maupun metode. Sehingga penulis berharap kritik dan saran demi perbaikan buku di masa mendatang. Semoga buku sederhana ini bisa menjadi referensi alternatif seputar epistemologi dan Covid-19.

Yogyakarta, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Bahan Penelitian	11
2. Jalan Penelitian	12
3. Analisis Hasil.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II SELAYANG PANDANG CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	17
A. Pengertian Covid-19	17
B. Asal Mula Virus Corona	18
C. Penularan dan Gejala-Gejala Covid-19	20
D. Persebaran Covid-19 di Indonesia	22
E. Kebijakan Penanggulangan Covid-19	26
BAB III EPISTEMOLOGI DAN RUANG LINGKUP	31
A. Pengertian Epistemologi	31
B. Hakikat Pengetahuan	33
C. Sumber-sumber Pengetahuan Manusia.....	37
D. Kebenaran Pengetahuan.....	43

BAB IV ANALISIS EPISTEMOLOGIS ATAS RESPON	
PUBLIK TERHADAP PANDEMI COVID-19....	51
A. Tipologi Respon Publik terhadap Pandemi Covid-19	51
B. Telaah Epistemologi Respon Publik dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	56
C. Bagaimana Sikap Kita Selanjutnya	79
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang dialami banyak negara tanpa terkecuali Indonesia. Sampai hari ini, pandemi Covid-19 ditengarai tengah memasuki fase atau gelombang kedua dengan tingkat penularan dan kematian tinggi. Beberapa negara bahkan mengalami eskalasi peningkatan penularan yang signifikan. Indonesia dalam kasus ini termasuk salah satu negara dengan jumlah penularan Covid-19 tertinggi di kawasan ASEAN dan Asia. Persebaran Covid-19 di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Grafik positif Covid-19 yang melesat tajam dalam hitungan hari menunjukkan Indonesia berada dalam situasi kewaspadaan tingkat tinggi atau darurat Covid-19.

Kasus Covid-19 di Indonesia mulai merebak di pertengahan Maret 2020. Kasus pertama Covid-19 terindikasi akhir Februari 2020. Selama kurang lebih 6 bulan pasca penemuan kasus Covid-19, Indonesia dinilai berhasil menurunkan jumlah kasus penularan Covid-19 (kurva melandai). Namun, di penghujung tahun 2020, kurva penularan mengalami peningkatan dan melesat naik secara signifikan. Lonjakan kasus yang cukup tinggi dengan tingkat positif harian di atas

100.000 menambah jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi satu juta kasus (Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April, www.kompas.com, diakses 2 Oktober 2020).

Sejumlah upaya preventif diterapkan yakni dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan (3M). Upaya ini bahkan dicanangkan sebagai suatu bentuk kebiasaan (adaptasi) di era normal baru. Namun demikian, upaya ini tidak berjalan optimal karena kasus penularan Covid-19 di Indonesia justru mengalami peningkatan pesat. Penyebab utama peningkatan kasus positif Covid-19 disinyalir bersumber dari ketidakpatuhan publik dalam menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat ditengarai kerap melanggar ketentuan protokol kesehatan sehingga berimbas kepada tingginya angka kasus penularan Covid-19 di Indonesia.

Ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran pandemi Covid-19. Publik menilai bahwa Covid-19 bukan merupakan pandemi. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa Covid-19 adalah rekayasa atau hoax. Ketidakpercayaan publik terhadap Covid-19 ditemukan melalui beragam respon masyarakat terhadap Covid-19.

Di awal merebaknya Covid-19, masyarakat menyangsikan keberadaan Covid-19. Covid-19 belum diterima sebagai sebuah fakta. Konsekuensinya adalah pemerintah dan masyarakat terlambat mengantisipasi penularan penyakit tersebut. Situasi yang tampak saat itu adalah kuatnya anggapan bahwa Covid-19 hanya penyakit infeksi biasa dengan persebaran terbatas. Respon negatif yang ditunjukkan publik menyebabkan pemerintah dan masyarakat gagal mencegah masuknya atau persebaran Covid-19 di Indonesia.

Pasca merebaknya Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia, sebagian masyarakat masih mempertanyakan kebenaran Covid-19. Publik ragu apakah Covid-19 merupakan virus berbahaya yang harus dihindari atau sebaliknya. Keraguan ini terlihat dari kesimpangsiuran informasi perihal pandemi yang beredar di masyarakat. Pernyataan ahli di berbagai media terkait Covid-19 semakin memperkeruh suasana karena informasi yang disampaikan ahli cenderung berbeda-beda (Publik Panik soal Korona, Ombudsman: Informasi dari Pemerintah Belum Komprehensif, www.kompas.id, diakses 3 Maret 2021). Sebagian masyarakat percaya bahwa Covid-19 merupakan pandemi namun sebagian yang lain bimbang dan menyangsikan kebenaran Covid-19. Ketidakpercayaan publik terhadap Covid-19 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi protokol

kesehatan. Mereka yang tidak percaya bahwa Covid-19 mematikan merasa tidak perlu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk antisipasi pandemi.

Tudingan negatif terhadap Covid-19 diperkuat melalui penanganan Covid-19 di sejumlah wilayah (Patrick, www.cnnindonesia.com, diakses 5 Januari 2021). Masyarakat menilai bahwa Covid-19 merupakan tindakan rekayasa bermotif ekonomi. Ditemukan sejumlah kasus perihal rekayasa rumah sakit terhadap pasien non Covid-19 agar diperlakukan sebagai pasien Covid-19 demi mendapatkan sejumlah keuntungan. Situasi ini tentu mengakumulasi ketidakpercayaan publik yang pada gilirannya beresiko pada upaya mengurangi penularan penyakit.

Pemerian vaksin sebagai upaya mengantisipasi dan mencegah persebaran Covid-19 pun diwarnai banyak perdebatan. Publik ragu atas efektivitas vaksin Covid-19. Terlebih karena pemerintah dinilai tidak transparan terkait vaksin yang disarankan untuk digunakan sebagai upaya pencegahan. Kasus-kasus penularan Covid-19 pasca vaksin di beberapa daerah memicu penolakan publik terhadap vaksin. Vaksin dinilai tidak efektif karena gagal mencegah penularan.

Penolakan terhadap vaksin tidak hanya disebabkan oleh ketidakefektifan vaksin. Publik menerima informasi bahwa vaksin Covid-19 menggunakan komposisi bahan yang diharamkan.

Informasi ini berakibat publik menolak pemerian vaksin karena menganggap vaksin bertentangan dengan prinsip-prinsip keyakinan. Perdebatan soal vaksin turut melibatkan isu yang lebih luas yakni hak asasi manusia (HAM). Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan pemerian vaksin kepada rakyat karena itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Penolakan publik sebenarnya bersumber pada ketidakjelasan informasi terkait vaksin Covid-19. Publik lantas memanfaatkan situasi tersebut dengan berlindung di balik HAM agar terhindar dari pemerian vaksin.

Berbagai reaksi dan respon yang ditunjukkan publik terhadap pandemi Covid-19 memerlukan pensikapan yang tepat melalui sejumlah pendekatan relevan. Pensikapan ini penting agar berbagai ketidakjelasan dan kesalahpahaman menyangkut Covid-19 yang beredar di tengah-tengah masyarakat dapat diminimalkan atau diantisipasi sedemikian rupa sehingga upaya pencegahan persebaran dan penularan Covid-19 di masyarakat dapat berjalan maksimal.

Respon publik terhadap pandemi Covid-19 tidak terlepas dari bangunan epistemologi yang melatarbelakangi respon tersebut. Perilaku publik dalam menanggapi Covid-19 merujuk pada basis epistemologi yang mengakar di masyarakat. Telaah epistemologis terkait respon publik dalam hal ini sangat diperlukan guna mengetahui bagaimana pendakuan

publik terhadap kebenaran Covid-19. Analisis yang tepat terhadap respon publik diharapkan akan sangat membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi penularan atau persebaran penyakit Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut;

1. Apa dan bagaimana respon publik dalam menanggapi pandemi Covid-19?
2. Bagaimana telaah epistemologis atas respon publik dalam menanggapi pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui tipologi respon publik dalam menanggapi pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis respon publik dalam menanggapi pandemi Covid-19 secara epistemologis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat praktis dan manfaat konseptual. Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Menyediakan data terkait respon publik dalam menanggapi informasi tentang pandemi Covid-19.
2. Memberi informasi terkait sosialisasi pandemi Covid-19 yang efektif.

Secara konseptual penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian sekaligus referensi alternatif berkenaan dengan telaah epistemologis respon publik terhadap pandemi Covid-19.

E. Tinjauan Pustaka

Tulisan pertama yang membahas epistemologi Covid-19 bersumber dari Muhammad Mustofa melalui tulisan berjudul *Epistemologi Seputar Covid-19: Menakar Sumber Informasi*. Tulisan ini dimuat dalam SINDONEWS.com. Mustofa dalam tulisannya menganalisis kebenaran informasi yang beredar seputar Covid-19. Menurutnya terdapat banyak *hoax* atau kebohongan dalam informasi seputar Covid-19 yang mesti disikapi dengan tepat. Tidak semua informasi tentang Covid-19 adalah benar.

Penilaian atas informasi tersebut tidak cukup dilakukan dengan menilai isi atau kandungan dari informasi tersebut melainkan perlu menimbang kredibilitas sumber atau pemberi informasi. Kuncinya menurut Mustofa (SINDONEWS.com, diakses tanggal 1 Mei 2021) adalah kita harus menakar kredibilitas pemberi informasi dan bukan menilai informasi yang

disebarkan. Kredibilitas pemberi informasi dalam hal ini sangat menentukan keakuratan dan validasi dari suatu informasi.

Penelitian Kerwanto yang berjudul *Covid-19 Ditinjau dari Epistemologi Tafsir Sufi* mengangkat isu Covid-19 melalui sudut pandang epistemologi tafsir sufi. Epistemologi tafsir sufi dalam penelitian ini diposisikan sebagai pisau analisis untuk menggali kandungan ayat-ayat Al Quran yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al Quran telah mengungkap keberadaan virus melalui ayat-ayat perumpamaan (metaforis) yang menjelaskan tentang keberadaan makhluk kecil, musibah dan kematian (Kerwanto, 2020: 371).

Penelitian berikutnya yakni *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Perspektif Filsafat Ilmu* oleh Sulistya Choirunnisa. Penelitian ini menggunakan tiga sudut pandang kefilosofan, yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam menjelaskan Covid-19. Pembahasan tentang epistemologi Covid-19 menyorot pada perubahan-perubahan yang terjadi akibat Covid-19 dalam kehidupan masyarakat. Choirunnisa menekankan peran dan urgensi teknologi sebagai upaya menjawab tantangan Covid-19. Teknologi menurutnya merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan dalam situasi pandemi. Teknologi mampu mengubah tren di masyarakat, mengubah

paradigma masyarakat dan memengaruhi perekonomian berkaitan dengan pandemi Covid-19 (Choirunnisa, 2020: 542). Pemanfaatan teknologi secara tepat dinilai sangat mendukung upaya antisipatif persebaran virus. Melalui teknologi, sosialisasi terkait Covid-19 dapat terlaksana optimal.

Penelitian lain yang tampak serupa namun memiliki perbedaan signifikan adalah tulisan Zumrotin Firdaus, dkk. Signifikansi tersebut terletak pada objek formal dan material yang digunakan dalam penelitian. Penelitian Zumrotin dkk. menyoal kebijakan Covid-19 melalui sudut pandang aksiologi. Kebijakan pemerintah terkait Covid-19 mempunyai manfaat lain seperti dihapuskannya ujian nasional (UN). Sistem UN selama ini sarat kritik karena nilai UN dijadikan sebagai patokan keberhasilan siswa di sekolah. Penggunaan anggaran belanja pemerintah juga dinilai tepat sasaran dan semakin selektif (efisien dan efektif) karena anggaran bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan terakhir kebijakan pemerintah mampu mendorong tumbuhnya toleransi dan kepekaan sosial masyarakat.

Tulisan-tulisan di atas meskipun menyasar pada objek material yang sama yakni Covid-19, namun memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang tengah dilakukan saat ini. Tulisan pertama berfokus

pada validitas informasi seputar Covid-19. Sejumlah informasi yang beredar di masyarakat dinilai mengandung hoax. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan pertama, kebenaran informasi ditentukan tidak hanya melalui konten namun juga pemberi informasi maka diperlukan upaya menimbang kredibilitas dan latar belakang sumber informasi. Tulisan kedua menganalisis Covid-19 melalui epistemologi tafsir. Kesimpulan akhir ditemukan sejumlah ayat dalam Al Quran yang mengungkap keberadaan Covid-19 secara metaforis.

Tulisan ketiga menilik Covid-19 melalui perspektif filsafat ilmu. Pembahasan epistemologi dalam tulisan ini diarahkan pada peran dan urgensi teknologi dalam menghadapi tantangan Covid-19. Teknologi di masa pandemi menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Situasi pandemi Covid-19 mendorong publik untuk dapat lebih memanfaatkan teknologi guna mengantisipasi problem yang ditimbulkan covid-19.

Tulisan terakhir memosisikan aksiologi sebagai perspektif dalam menganalisis kebijakan pemerintah di masa pandemi. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan pemerintah memotensikan kegunaan dan manfaat lain di luar tujuan utama yang ingin dicapai dari kebijakan itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan objek formal yang sama dengan tulisan-tulisan di atas yakni epistemologi. Namun berbeda dalam pemilihan objek material. Objek material dalam penelitian ini adalah respon publik dalam menanggapi pandemi Covid-19. Respon publik terhadap pandemi Covid-19 dikaitkan dengan tema atau bahasan khusus epistemologi seperti sumber-sumber pengetahuan manusia dan validitas pengetahuan sehingga didapatkan gambaran tentang epistemologi respon publik terhadap pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif kefilosofan dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Studi kepustakaan dipilih atas pertimbangan bahwa bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data-data kepustakaan baik cetak maupun *online*.

1. Bahan Penelitian

Bahan-bahan atau materi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer dan sekunder. Bahan primer penelitian merujuk pada sejumlah literatur yang membahas persoalan pokok atau objek material dalam penelitian yakni Covid-19 dan respon publik terhadap pandemi Covid-19. Sedangkan bahan sekunder merujuk pada literatur

pendukung yang secara tidak langsung mengkaji pokok masalah dan objek formal penelitian.

2. Jalan Penelitian

a. Pengumpulan Data.

Berbagai literatur yang berkaitan dengan objek material dan formal dikumpulkan dari sumber-sumber relevan. Literatur yang tersedia selanjutnya ditandai satu persatu dan dipilah untuk kemudian dilakukan pengolahan data.

b. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dan digolongkan sesuai kepentingan dan relevansi penelitian serta dianalisis mengikuti langkah-langkah metodis yang telah dipilih guna menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Penyusunan Penelitian

Penyusunan penelitian dilakukan dengan mengikuti format dan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

3. Analisis Hasil

Analisis hasil dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah metodis sebagai berikut:

a. Deskripsi

Masalah pokok penelitian dideskripsikan sedemikian rupa untuk selanjutnya dianalisis dan

dibahasakan kembali. Hal ini dilakukan agar ditemukan suatu kesatuan menyeluruh antara fenomena atau permasalahan yang diangkat dengan hasil analisis.

b. Interpretasi

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga ditemukan makna terdalam dari data-data penelitian tersebut beserta keterkaitannya antara satu dengan yang lain.

c. Koherensi

Data-data yang tersedia dirasionalisasi atau dihubungkan secara logis agar dapat dipahami secara menyeluruh.

d. Heuristika

Data-data dianalisis guna menemukan suatu kebaruan penelitian.

e. Holistika

Data-data ditilik dari berbagai kemungkinan yang ada dan relevan.

f. Sintesis

Meramu dan menarik kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan terhadap data-data penelitian agar diperoleh jawaban akhir atas masalah penelitian.

G.Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian secara umum ini terdiri dari 3 bagian pokok, yakni pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup. Ketiga bagian pokok tersebut selanjutnya diuraikan secara khusus ke dalam bab-bab berikut:

- Bab pertama, **Pendahuluan.**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab kedua, **Selayang pandang *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.**

Bab ini memberikan gambaran umum perihal Covid-19. Gambaran tentang Covid-19 merupakan pintu masuk bagi analisis objek formal penelitian. Bab 2 berisikan 3 sub bab antara lain pengertian Covid-19, asal mula virus corona dan gejala serta persebaran Covid-19 di Indonesia serta upaya pencegahan Covid-19

- Bab ketiga, **Epistemologi dan ruang lingkup.**

Bab ini mengulas objek formal penelitian yakni epistemologi. Penjelasan dalam bab tiga terdiri dari definisi epistemologi, hakikat pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan serta validitas kebenaran dalam epistemologi.

- Bab keempat, **Analisis epistemologis atas respon publik terhadap pandemi Covid-19.**

Bab 4 merupakan bagian inti yang merupakan pembahasan masalah penelitian. Bab ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan menampilkan bahasan tentang tipologi respon publik terhadap pandemi Covid-19 dan telaah epistemologi atas respon yang ditunjukkan tersebut.

- Terakhir bab kelima, **Penutup.**

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

SELAYANG PANDANG *CORONAVIRUS* DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Pengertian Covid-19

Covid-19 atau *Coronavirus* 2019 merupakan sejenis virus RNA yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Virus RNA adalah virus yang mempunyai materi genetik ribonukleat. Ukuran partikel virus ini berkisar 120-160 nm. Virus Corona berbentuk bulat dengan sebaran mahkota di permukaan. Nama Corona sendiri diambil dari ciri mahkota (*crown* atau *corona*) pada virus. *Coronavirus* termasuk dalam genus betacoronavirus. Virus yang terkategori sebagai virus *zoonosis* menginfeksi sejumlah populasi hewan seperti kelelawar, luwak dan unta. Virus ini bermutasi dan selanjutnya menyerang manusia serta menyebabkan penyakit pernapasan terkategori ringan, sedang hingga berat (Yuliana, 2020: 188)..

Trenggiling diduga sebagai perantara penyebaran Covid-19 kepada manusia. *Strain Coronavirus* pada trenggiling memiliki kemiripan dengan *Coronavirus* kelelawar dan SARS-Cov-2. Sehingga Coronavirus kerap disalahpahami sebagai MERS atau SARS-2. Sebelum Covid-19, dunia sempat dilanda pandemi sejenis, yakni Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV) pada tahun 2002 dan *Middle East Respiratory*

Syndrome (MERS-CoV) di tahun 2012. Penularan SARS-CoV diketahui melalui perantaraan unta sedangkan MERS-CoV diidentifikasi menular melalui luwak. Kendati ditemukan sejumlah kesamaan dengan pandemi sebelumnya namun virus ini berbeda dengan virus-virus yang menyebabkan pandemi terdahulu.

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan Januari 2020 mengeluarkan pernyataan resmi terkait virus tersebut dan merilis nama bagi virus penyebab pneumonia akut dengan *Coronavirus* atau SARS-Cov-2. WHO juga menyatakan *Coronavirus Disease* 2019 atau Covid-19 sebagai nama penyakit yang diakibatkan oleh penularan virus Corona pada bulan Februari 2020. Beberapa bulan setelah penemuan kasus pertama Covid-19, Covid-19 dilaporkan telah menyebar ke berbagai penjuru dan menyita perhatian negara-negara di dunia. Situasi ini akhirnya mengantarkan WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global tepatnya pada bulan Maret 2020.

B. Asal Mula Virus Corona

Virus SARS-CoV-2 atau *Coronavirus* yang menjadi penyebab utama pandemi Covid-19 terdeteksi pertama kali di wilayah Cina daratan, tepatnya di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina, pada akhir Desember 2019. Lokasi awal penyebaran virus diduga adalah pasar hewan Wuhan. Meskipun demikian, lokasi

penemuan awal virus masih spekulatif. Teori lain menyatakan bahwa virus ini bersumber dari Institut Virologi Wuhan (WIV) yang berlokasi tidak jauh dari pasar hewan. Pemerintah Cina sejauh ini telah membantah teori tersebut dan menolak tuduhan bahwa persebaran virus Corona terjadi akibat kelalaian atau tindak kesengajaan.

Virus yang menyebar melalui perantara hewan (zoonosis) menginfeksi manusia dan menyebabkan penularan antar manusia. Virus ini diduga berpindah dari populasi hewan tertentu ke manusia setelah sebelumnya bermutasi dan menyebabkan penularan masif dari manusia ke manusia.

Selang beberapa bulan sejak awal teridentifikasi, virus ini telah menyebar ke seantero dunia dan menyebabkan kurang lebih 178 juta kasus terkonfirmasi positif dengan 3,9 juta kematian. Thailand tercatat sebagai negara kedua setelah Cina yang melaporkan kasus Covid-19 setelah itu berturut-turut sejumlah negara melaporkan kasus serupa. Penyebaran dan penularan virus yang sedemikian pesat menyebabkan dunia dilanda pandemi berkepanjangan.

Laporan pertama kasus Covid-19 menunjukkan gejala pneumonia akut seperti demam, *malaise*, batuk kering dan *dyspnea*. Berdasarkan hasil penyelidikan intensif terhadap gejala disimpulkan bahwa penyebab gejala tersebut adalah *Coronavirus* dengan varian baru.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengistilahkan virus tersebut dengan *Coronavirus* pada tanggal 12 Januari 2020. Dan selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020 WHO merilis nama penyakit yang disebabkan *Coronavirus* dengan *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19. Penamaan virus ini penting mengingat terdapat kesamaan dengan pandemi yang pernah melanda dunia. Penamaan ini juga sekaligus mencirikan secara spesifik varian virus yang menyebabkan penyakit dengan gejala serupa pneumonia.

C. Penularan dan Gejala-Gejala Covid-19

Covid-19 diindikasikan menular melalui *droplet*, sejenis partikel cair berukuran mikro yang terlempar atau terlontar ke udara saat penderita atau seseorang yang positif Covid-19 bersin, batuk atau berbicara. Covid-19 juga menular melalui kontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi atau terpapar Covid-19. Virus Corona masuk ke dalam tubuh melalui mata (kornea mata), hidung (terhirup) dan mulut atau lewat perantaraan benda atau tangan yang terkontaminasi virus. Sebelumnya, penularan virus disebabkan kontak langsung manusia dengan hewan-hewan tertentu yang merupakan inang virus seperti ular, kelelawar kucing dan hewan ternak.

Penularan Covid-19 sebagian besar menysasar kepada kelompok usia lanjut (lansia) dengan penyakit penyerta (*komorbid*). Kelompok lansia menjadi kelompok yang rentan atau beresiko tinggi tertular Covid-19. Kematian lansia akibat Covid-19 terbilang dominan. Rendahnya *imun* atau daya tahan tubuh dan penyakit penyerta yang diidap lansia disinyalir menjadi penyebab utama kematian lansia dengan Covid-19.

Seseorang yang terpapar Covid-19 menunjukkan gejala seperti pengidap flu ringan. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya terjadi antara dua hingga 14 hari. Perburukan mungkin berlangsung dalam kurun 14 hari tersebut. Gejala yang ditunjukkan oleh pengidap Covid-19 bisa sangat bervariasi. Beberapa gejala yang umum dirasakan oleh penderita antara lain:

- Demam
- Menggigil
- Batuk berat dan tidak berdahak
- Hidung berair
- Nyeri atau sakit tenggorokan
- Sakit mata (Ramadhan, www.grafis.tempo.co, diakses 3 Maret 2020)
- Sesak napas
- Pegal-pegal atau nyeri otot
- Kehilangan rasa pengecap dan bau
- Diare

Gejala tersebut dapat bertambah parah dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Pasien yang terinfeksi *Coronavirus* dapat mengalami gejala gangguan pernapasan akut seperti pada penderita pneumonia berat. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung dan infeksi sekunder sangat dimungkinkan terjadi jika kondisi tersebut tidak segera diatasi atau mendapatkan perawatan semenjak dini atau penyakit tersebut mengalami situasi perburukan yang sangat cepat.

Tindakan medis yang diambil terkait dengan gejala yang dirasakan adalah pemeriksaan penunjang sebagai syarat penegakan diagnosa. Sejumlah tes dilakukan untuk memvalidasi apakah seseorang terpapar Covid-19 atau tidak. Tes tersebut meliputi pemeriksaan darah dan pengambilan spesimen dari hidung dan tenggorokan dengan teknik usap. Tes lanjutan untuk mengetahui kondisi penderita adalah *rontgen* dada untuk mengetahui kondisi paru-paru pasien Covid-19.

D. Persebaran Covid-19 di Indonesia

Covid-19 di Indonesia terdeteksi pertama kali pada bulan Februari 2020. Dua orang WNI mengalami gejala serupa dengan gejala yang ditunjukkan kasus Wuhan dan dianggap sebagai *suspect* Covid-19. Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan mendalam,

pemerintah pada bulan Maret 2020 menyampaikan pernyataan resmi bahwa kedua orang terduga Covid-19 tersebut berstatus positif mengidap Covid-19 (Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan, www.merdeka.com, diakses 1 Maret 2021).

Pasca penemuan kasus pertama Covid-19, beberapa bulan berikutnya yakni pada bulan April 2020, Covid-19 dilaporkan telah menginfeksi 34 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ditetapkan sebagai provinsi dengan jumlah kasus terbanyak positif Covid-19. Pada bulan Juni 2021, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan tingkat penularan Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ketiga di Asia setelah Cina dan India Berikut provinsi-provinsi dengan total kasus corona tertinggi di Indonesia per tanggal 17 Juni 2020:

Provinsi	Kasus Terkonfirmasi		
	Positif	Sembuh	Meninggal
Jakarta	9.349	4.445	563
Jawa Timur	8.533	2.381	651
Sulawesi Selatan	3.200	1.104	123
Jawa Barat	2.703	1.177	169

Jawa Tengah	2.346	860	121
Kalimantan Selatan	2.208	333	141
Sumatera Selatan	1.541	682	61
Papua	1.311	297	7

<https://tirto.id/sebaran-corona-di-indonesia-hari-ini-update-data-17-juni-2020-fJjL>

Infografis persebaran Covid 19 per tanggal 1 Juni 2020



https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1267382039780528128/photo/3

Penyebaran Covid-19 yang begitu tinggi dan meluas di berbagai daerah bahkan hingga ke pelosok disikapi pemerintah dengan sejumlah kebijakan penanggulangan Covid-19. Beberapa kebijakan pemerintah terkait upaya mencegah penyebarluasan Covid-19 antara lain; kebijakan pembatasan wilayah (PSBB) dan protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah

terkait pembatasan wilayah ditujukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Pembatasan ini secara spesifik mengatur interaksi antar manusia dengan membatasi mobilitas dan ruang gerak manusia. Dalam lingkup terbatas, pemerintah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan sebagai upaya menciptakan kebiasaan baru di masa pandemi.

Kebijakan protokol kesehatan dimaksudkan untuk mencegah penularan Covid-19 melalui penerapan sejumlah aktivitas atau kebiasaan di masa pandemi. Protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah sebagai langkah pencegahan antara lain memakai masker atau penutup hidung dan mulut, mencuci tangan dengan *sanitizer* dan menjaga jarak (*social distancing*) atau 3M. Protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah sebagai adaptasi kebiasaan baru diharapkan akan mengurangi intensitas penularan Covid-19.

Persebaran Covid-19 di kota-kota besar di Indonesia terbilang masif. Hal ini ditengarai akibat ketidakpatuhan pemerintah maupun masyarakat dalam menerapkan kebijakan penanggulangan Covid-19. Tren kepatuhan terhadap protokol kesehatan cenderung fluktuatif. Situasi ini berdampak pada lonjakan kasus Covid-19 yang sebelumnya sempat melandai. Ketidakpatuhan publik dan pelanggaran aturan pasca menurunnya kurva positif Covid-19 memicu

gelombang kedua penularan kasus Covid-19 di Indonesia.

E. Kebijakan Penanggulangan Covid-19

Kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 secara umum dibedakan menjadi dua yakni kebijakan umum dan kebijakan sektoral. Pandemi Covid-19 yang dialami dunia berimbas ke berbagai dimensi kehidupan manusia tanpa terkecuali pandemi di Indonesia. Pemerintah meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama di samping sektor-sektor yang lain. Hal ini tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat keputusan bernomor 7 tahun 2020 pada bulan Maret 2020. Kebijakan ini selanjutnya diikuti dengan kebijakan lain seperti pembatasan wilayah, protokol kesehatan, larangan mudik, tes massal dan penyediaan vaksin (Gitiyarko, www.kompaspedia.kompas.id, diakses 10 Maret 2021).

Dampak Covid-19 yang signifikan dan memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat mendorong pemerintah secara aktif mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada penanganan Covid-19 secara komprehensif dan terpadu. Sejumlah satuan tugas dan komite dibentuk untuk menangani Covid-19. Selain gugus tugas, dibentuk pula komite kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi.

Kebijakan umum pemerintah merupakan dasar bagi penerapan kebijakan yang bersifat sektoral. Secara spesifik kebijakan tersebut antara lain;

a. Kebijakan sektor kesehatan

Kebijakan sektor kesehatan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, kesiapsiagaan rumah sakit dan instalasi laboratorium, ketersediaan alat pelindung diri, sistem kendali covid-19, Ketersediaan kebutuhan farmasi, penetapan normal baru dan program vaksin (Gitiyarko, www.kompaspedia.kompas.id, diakses 10 Maret 2021).

b. Kebijakan sektor pendidikan

Kebijakan pendidikan di masa pandemi diwujudkan melalui pembatasan kelas tatap muka dan pembelajaran daring serta pemberian bantuan kuota bagi para siswa dan pendidik.

c. Kebijakan sektor agama

Pemerintah melarang pelaksanaan ibadah dan perayaan hari besar keagamaan yang dilakukan secara masal atau berkerumun. Pemerintah melalui kementerian agama mengeluarkan serangkaian panduan terkait peribadatan di masa pandemi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Selama pandemi, pemerintah menghentikan sementara pengiriman jamaah haji dan umroh.

d. Kebijakan sosial ekonomi

1. Kebijakan sosial terkait penanggulangan Covid-19 dilakukan pemerintah melalui kegiatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat penularan dan penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah. Pembatasan ini kemudian berlanjut dengan kebijakan lain seperti PSBB berskala mikro, pembatasan mikro dan terakhir PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).
2. Terkait tata pemerintahan, pemerintah mengubah sistem kerja kantoran (offline) menjadi daring atau *work from home* (WFH) dan melarang ASN melakukan kegiatan perjalanan dinas atau keluar kota. Pemerintah dalam hal ini juga mengeluarkan panduan tata laksana pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana pencegahan Covid-19 di kantor-kantor pemerintahan.
3. Masyarakat umum selama pandemi tidak diperkenankan melakukan kegiatan berpergian atau mudik saat hari raya keagamaan.
4. Pemerintah melakukan pembatasan armada transportasi umum dan menetapkan syarat yang harus dipenuhi selama perjalanan.
5. Selama pandemi berlangsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak akibat pembatasan

mobilitas masyarakat. Bantuan sosial secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di saat yang sama pemerintah juga menerbitkan kebijakan kartu pra kerja bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19.

6. Sebelumnya, demi memulihkan perekonomian, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan stimulus pariwisata yang didukung oleh para pemengaruh (Setahun Pandemi Covid-19, Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritiknya, www.nasional.tempo.co, diakses 1 April 2021)
7. Pemerintah melalui kementerian keuangan melakukan pengenaan dan pengurangan pajak pada objek pajak tertentu.

BAB III

EPISTEMOLOGI DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian Epistemologi

Epistemologi atau yang umum dikenal sebagai filsafat pengetahuan berasal dari bahasa Yunani, yakni *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti perkataan, nalar, teori atau ilmu. Kata *episteme* sendiri dalam bahasa Yunani memiliki kesamaan arti dengan kata *gnosis* yang juga berarti pengetahuan sehingga terdapat istilah lain selain epistemologi yaitu gnoseologi. *Episteme* berasal dari kata *epistamai* yang artinya mendudukan, meletakkan memosisikan atau menempatkan. Secara harfiah, *episteme* dimaksudkan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya (Sudarminta, 2002: 18).

Epistemologi berdasarkan pengertian etimologi dipahami sebagai ilmu tentang hakikat pengetahuan atau ilmu yang membahas tentang hal ihwal pengetahuan manusia. Pengertian ini sejalan dengan pengertian epistemologi menurut Surajjiyo (2008: 53) yang menyatakan bahwa epistemologi berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki manusia. Bagus (2002: 212) mengartikan epistemologi

sebagai pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan.

Sudarminta (2002: 18) mendefinisikan epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat yang bermaksud mengkaji dan menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan didapatkan dan diuji kebenarannya dan manakah ruang lingkup atau batas-batas kemampuan manusia untuk mengetahui?. Terkait dengan hal ini, A. S Rappoport (2019: 171) mengajukan tiga pertanyaan pokok dalam epistemologi, yaitu:

1. Apakah pengetahuan itu? Atau pertanyaan tentang sifat dasar pengetahuan.
2. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan kita? atau pertanyaan tentang asal mula pengetahuan.
3. Adakah sebuah kemungkinan pengetahuan? atau pertanyaan tentang validitas dan batasan-batasan pengetahuan.

Hal yang sama turut dikemukakan Titus, et. al (1979: 161), menurutnya ada tiga pertanyaan atau problem dalam epistemologi,

1) What are the sources of knowledge, Where does genuine knowledge come from, or how do we know? This is the question of origin. 2) What is the nature of knowledge? Is there a real world outside the mind, and if so, can we know it? This is the question of apperance versus reality. 3) Is our knowledge valid?

How do we distinguish truth from error? This is the question of the test of truth of verification.

Berdasarkan pengertian dan problem pokok epistemologi yang dikemukakan sejumlah tokoh, dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat atau sub sistem filsafat yang membahas atau mengkaji hakikat pengetahuan manusia, sumber-sumber pengetahuan manusia dan validitas atau kebenaran yang terdapat dalam pengetahuan manusia.

B. Hakikat Pengetahuan

Pengetahuan (knowledge) merupakan hasil dari kegiatan dasar manusia yakni mengetahui. Pengetahuan diperoleh manusia melalui suatu proses yang melibatkan kesadarannya. Bagus (2002: 803) menyatakan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Manusia secara sadar mengerahkan dirinya untuk memperoleh pengetahuan. Kegiatan manusia untuk mengetahui atau mencari tahu pada dasarnya bersifat kodrati (Gallagher, 1994: 13) dan naluriah. Kegiatan ini didorong oleh rasa ingin tahu manusia yang mendalam sebagai reaksi atas ketakjuban atau kekaguman luar biasa pada realitas atau lingkungan sekitar.

Pengetahuan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak dapat menjalani kehidupan tanpa pengetahuan. Pengetahuan adalah rangkuman

jawaban atau sumber jawaban (Suriasumantri, 20027: 104) dari serangkaian pertanyaan yang muncul ke permukaan. Peristiwa kehidupan yang dilalui manusia menghadapkan manusia pada beragam permasalahan. Permasalahan itu diselidiki manusia dan melahirkan pengetahuan yang diperlukan manusia.

Realitas merupakan misteri yang menggugah keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya berusaha mengerti, memahami dan memecahkan misteri yang menyelimuti realitas. Rasa ingin tahu menggerakkan manusia untuk melakukan penyelidikan guna mengatasi *curiosity* (keingintahuannya) atas sesuatu yang mengagumkan tersebut. Berangkat dari kekaguman dan rasa takjub, manusia memulai kegiatan awal mengetahui, yakni dengan mengajukan pelbagai pertanyaan terkait realitas yang menimbulkan kekaguman.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan manusia terkait erat dengan sesuatu yang menarik minat dan perhatian manusia. Kekaguman manusia akan sesuatu tersebut tidak tinggal diam atau berhenti sebatas kekaguman biasa. Ketakjuban itu ingin ditelusuri manusia sehingga ia memperoleh latar atau sebab mengapa sesuatu itu sedemikian mengagumkan. Perjalanan manusia mengarungi kehidupan menghadapkan manusia *vis a vis* pada realitas yang rumit dan serba kompleks.

Kehidupan sedari awal menantang manusia untuk berdinamika dan beradaptasi dengan kenyataan. Manusia tidak bisa mengelak dari kenyataan dan terpaksa menghadapi konsekuensi yang timbul dari interaksinya dengan kenyataan. Konsekuensi itu membuka peluang dan memungkinkan manusia menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya.

Kenyataan adalah *given* (terberi). Manusia berada di tengah-tengah kenyataan yang tidak bisa disangkalnya. Kenyataan ada dan senantiasa menyelimuti atau melingkupi manusia. Kenyataan dengan segenap misteri di baliknya mengusik rasa ingin tahu manusia, dan memaksa manusia untuk berinteraksi lebih jauh masuk ke dalam realitas guna mendapatkan jawaban dari keingintahuannya. Manusia sendiri adalah makhluk yang sadar bahwa dirinya berada dalam dan bersama realitas seperti yang dinyatakan van Peursen (1991: 19) bahwa manusia maklum akan dunia, ia sadar dan maklum akan dunia sekitarnya. Kesadaran inilah yang menggiring manusia untuk menginsyafi realitas.

Interaksi manusia dengan realitas melahirkan pengetahuan. Pengetahuan merupakan akibat atau konsekuensi logis dari keterhubungan manusia dengan realitas. Tanpa interaksi atau keterhubungan dengan realitas mustahil bagi manusia memperoleh pengetahuan. Relasi manusia dengan realitas atau

lingkungan sekitar merupakan syarat mutlak bagi hadirnya pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui proses interaktif manusia yang berkedudukan sebagai subjek dengan realitas sebagai objek. Hubungan timbal balik antara manusia dan realitas merupakan kunci memasuki cakrawala pengetahuan.

Pengetahuan menurut Pranarka (1987: 38) adalah suatu persatuan antara subjek dan objek. Subjek dan objek saling terkait satu sama lain, aktif (Bagus, 2002: 803) dan tidak terpisahkan. Subjek dalam hal ini secara sadar berusaha menghadirkan dan menyatukan objek ke dalam dirinya. Dengan cara ini, manusia selaku subjek memperoleh pengetahuan tentang objek. Pengetahuan diperoleh subjek karena subjek mempunyai daya dan perangkat untuk mengetahui. Sebaliknya, objek juga memiliki daya untuk diketahui. Hubungan aktif antar keduanya memungkinkan subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek.

Manusia menginginkan pengetahuan yang dimilikinya tidak terbatas ruang dan waktu, artinya berlaku umum (universal), kapanpun dan dimanapun (van Peursen, 1991: 20). Pengetahuan universal mempunyai arti penting bagi hidup manusia. Pengetahuan ini mengatasi pengalaman sehari-hari manusia yang serba terbatas dan sekaligus membuka peluang bagi pemahaman bersama akan suatu masalah. Pengetahuan universal diperoleh manusia melalui

proses abstraksi yang melampaui pengalaman dan melibatkan peran akal budi. Pengetahuan universal dalam hal ini memungkinkan manusia menapaki dunia yang lebih luas dan mengatasi keterbatasan yang mungkin, fisik dan jasmani.

C. Sumber-Sumber Pengetahuan Manusia

Persoalan pokok dalam epistemologi melahirkan berbagai aliran filsafat dengan corak khas masing-masing. Beberapa aliran dalam filsafat seperti empirisme, rasionalisme, dan intuisiisme berpangkal dari telaah atas sumber-sumber atau asal mula pengetahuan manusia. Sumber-sumber pengetahuan manusia menjawab persoalan dasar epistemologi yaitu dari manakah manusia memperoleh pengetahuan atau asal usul pengetahuan.

Pengetahuan manusia tidak diperoleh secara tiba-tiba. Pengetahuan didapat melalui sebuah proses interaktif antara manusia dengan realitas. Tanpa keterhubungan dengan realitas, manusia tidak akan pernah memperoleh pengetahuan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa subjek yakni manusia dan objek mempunyai daya yang saling berhubungan satu sama lain. Subjek mempunyai daya atau perangkat untuk mengetahui sedangkan objek memiliki daya untuk diketahui.

Manusia mempunyai daya atau perangkat untuk mengetahui yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Sarana untuk mengetahui dalam diri manusia beragam. Manusia umumnya mengandalkan sejumlah sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang diinginkannya. Setiap pengetahuan membutuhkan sarana tertentu sebagai instrumen validasi. Keyakinan akan suatu pengetahuan sangat bergantung dari spesifikasi sumber pengetahuan.

Sumber-sumber pengetahuan manusia menurut Hospers (1967: 122-144) terbagi atas 6 sumber, antara lain:

1. Indera (*Sense-experience*).
2. Rasio atau nalar (*Ratio*).
3. Intuisi (*Intuition*)
4. Otoritas (*Authority*).
5. Revelasi (*Revelation*).
6. Keyakinan (*Faith*).

Titus, et.al. (1979: 181) membagi sumber pengetahuan ke dalam 4 sumber, antara lain:

1. *Testimony-a secondary source: the appeal to authority* (Otoritas).
2. *The senses as a source; the appeal to sense perception* (Indera).
3. *Thinking as a source: the appeal to reason* (Rasio).
4. *Insight as a source: the appeal to intuition* (Intuisi).

Pengetahuan manusia yang bersumber dari kemampuan indera dalam menanggapi realitas melahirkan aliran besar yakni empirisme. Beberapa tokoh yang menggawangi aliran ini antara lain; John Locke, David Hume, dan Thomas Hobbes. Empirisme mengasalkan kebenaran pengetahuan pada pengalaman yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Seluruh pengalaman yang dialami manusia menurut empirisme merupakan sumber otentik dari kebenaran. Pengalaman adalah sumber tunggal atau setidaknya sumber pokok pengetahuan (Rappoport, 2019: 177). Tanpa pengalaman, pengetahuan tidak lagi merupakan keniscayaan. *It asserts that knowledge is essentially sensation and that is no other knowledge* (Titus, et.al., 1979: 171).

Empirisme mengandalkan pengalaman sebagai potensi utama dalam menghadirkan pengetahuan. Pengalaman diperoleh melalui pencerapan inderawi dan indra batin manusia. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya dan dengan seluruh kenyataan, termasuk yang Ilahi (Sudarminta, 2002: 32). Pengalaman sehari-hari yang dialami manusia berkembang seiring dengan tumbuh kembang manusia. Semakin bertambah usia semakin bertambah

pengalaman manusia. Dengan sendirinya, meningkat pula pengetahuan manusia.

Rasionalisme merupakan aliran epistemologi yang mendakukan kebenaran berdasarkan kesahihan pikiran atau logika. *Rationalism is the view that we know what we have thought out, that the mind has the ability to discover truth by itself, or that knowledge is obtained by comparing ideas with ideas* (Titus, et.al., 1979: 172). Beberapa tokoh di balik aliran ini antara lain Immanuel Kant dan Descartes. Rasionalisme menolak pengetahuan yang bersumber dari indera. Pengetahuan yang diterima melalui indera menurut rasionalis tidak bisa didaku sebagai kebenaran.

Pengetahuan dalam rasionalisme bertumpu pada kuasa akal. Hanya dengan cara berpikir maka pengetahuan yang benar bisa diperoleh. Pengalaman manusia yang sangat terbatas, demikian pula dengan kenyataan yang cenderung berubah-ubah menyebabkan empirisme memperoleh tantangan serius dari rasionalisme. Pengetahuan empiris yang subjektif, berbeda dengan pengetahuan rasional yang objektif. Subjektivitas yang kental dalam empirisme membatasi lingkup pengetahuan yang dihasilkan manusia dan menjadikan pengetahuan manusia tersebut sempit dan bersifat relatif.

Intuisiisme yang dipopulerkan oleh Henri Bergson mengasalkan kebenaran pada pengetahuan

langsung yang diterima oleh manusia sebagai *insight*. Istilah intusi sendiri bisa dimaknai sebagai ilham, gerak atau bisikan hati atau sesuatu yang bersumber dari nurani manusia. Intuisi merupakan kegiatan berpikir nonanalitik yang tidak mendasarkan diri kepada suatu pola berpikir tertentu (Suriasumantri, 2007: 44). Pengetahuan intuitif terkadang diterima sebagai sebuah jawaban yang diperoleh secara kontemplatif atau hadir begitu saja dalam diri manusia. Manusia dalam kesehariannya kerap menerima pengetahuan yang tidak bersumber dari indera atau rasio terutama berkaitan dengan peristiwa atau pengalaman yang bersifat artistik atau estetis. Namun demikian, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama untuk menerima pengetahuan jenis ini. Pengetahuan intuitif mungkin diperoleh jika manusia sudi melepas diri dari rutinitas dan mengasah serta melatih diri melalui jalan kontemplatif.

Pengetahuan otoritas mengandalkan peran otoritas tertentu dalam memastikan kebenaran. Otoritas di sini dapat berupa kepakaran, keahlian tertentu, senioritas, sosok atau figur yang dihormati. Semua yang disampaikan oleh mereka yang memiliki otoritas atau berwenang merupakan kebenaran yang harus diikuti atau ditaati. Kebenaran dalam konteks otoritas memosisikan otoritas tertentu sebagai acuan atau dasar bagi suatu kebenaran. Semakin kuat kedudukan

seseorang maka tingkat ketaatan atas kebenaran semakin kuat. Sebaliknya semakin rendah kewenangan maka kebenaran yang disandarkan pun semakin lemah.

Revelasi mendasarkan kebenaran pada kitab suci atau wahyu. Dengan wahyu manusia akan memperoleh pengetahuan yang benar lewat keyakinan (Suriasumantri, 2007: 44). Aliran revelasionisme memosisikan kitab suci sebagai rujukan utama dalam mewarta kebenaran. Apapun yang bersumber dari wahyu diyakini sepenuhnya sebagai suatu kebenaran. Penganut aliran ini pada umumnya berlatar belakang teologis dominan.

Manusia memperoleh pengetahuan melalui berbagai sumber. Setiap sumber pengetahuan memiliki corak kebenaran yang khas. Namun demikian pengetahuan manusia dalam banyak hal tidak hanya didasarkan pada satu sumber pengetahuan melainkan banyak sumber. Setiap masalah yang dihadapi manusia didekati dari berbagai pendekatan. Tidak semua masalah cocok didekati melalui satu sumber pengetahuan. Manusia memilih jalan yang sesuai untuk menganalisis masalah. Hal ini dilakukan agar masalah tersebut menemukan jawaban yang tepat.

Semua jalan pengetahuan ditempuh manusia. Manusia tidak bisa membatasi diri pada satu pendekatan. Problem yang dihadapi manusia sedemikian kompleks sehingga diperlukan pendekatan

yang komprehensif dengan menimbang berbagai persepektif.

D. Kebenaran Pengetahuan

Persoalan utama dalam pengetahuan adalah validitas atau kebenaran dari suatu pengetahuan. Suatu pengetahuan mensyaratkan kualitas kebenaran tertentu. Kebenaran sendiri merupakan hal yang fundamental bagi manusia. Sejak dulu hingga saat ini, manusia tidak pernah berhenti bergelut dengan persoalan kebenaran. Para filsuf lintas zaman dan generasi membincang kebenaran tanpa putus dengan segenap problematika yang melingkupinya.

Manusia sejak dahulu kala terobsesi dengan kebenaran. Manusia ingin mendapatkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang bisa diyakini, dipercaya dan digenggam sebagai pedoman. Penjelajahan manusia terhadap semesta pada hakikatnya ditujukan untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran merupakan muara atau finalitas dari apa yang diinginkan oleh manusia dalam setiap penyelidikannya terhadap realitas. Manusia mendambakan jawaban yang benar atau mendekati benar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait keingintahuannya.

Kebenaran mempunyai kedudukan yang vital bagi hidup manusia. Orientasi hidup manusia sepenuhnya didasarkan pada apa yang diyakininya

sebagai benar. Kebenaran merupakan prinsip yang melandasi tindakan dan perbuatan manusia. Manusia menjadikan pengetahuan yang benar sebagai dasar, pedoman dan acuan dalam berkehidupan. Setiap tindakan dan perbuatan manusia senantiasa berkaitan erat dengan sesuatu atau apa yang dianggapnya benar. Kegiatan manusia hampir dapat dipastikan bertolak dari pengetahuan yang benar.

Kebenaran secara umum dipahami sebagai kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ukuran yang digunakan dalam kebenaran adalah kenyataan. Istilah lain dari kebenaran adalah *aletheia* (bahasa Yunani) yang artinya tersingkap adanya. Istilah ini mempunyai pengertian bahwa kebenaran ada dalam situasi dimana manusia mampu mencapai hakikat yang tersingkap dari objek. Namun Plato beranggapan bahwa manusia tidak akan pernah sampai pada kebenaran itu. Semua yang tampak tidak lain adalah tipuan dan bukan kenyataan yang sesungguhnya.

Aristoteles memberi penekanan pada kualitas pernyataan yang digunakan dalam menyatakan kebenaran. Ada tidaknya kebenaran ditentukan oleh apa yang dinyatakan. Pernyataan yang digunakan dalam menyatakan kenyataan harus disusun secara tepat sehingga kenyataan dapat terungkap dengan akurat. Kebenaran dalam perspektif Aristoteles bertumpu pada peran subjek dan bukan objek. Subjek mempunyai

peran penting dalam upaya mengafirmasi kenyataan. Tanpa subjek, objek kehilangan kebermaknaan dan tidak memberi arti apapun bagi manusia.

Berdasarkan pada pandangan di atas maka kebenaran dibedakan atas kebenaran faktual dan kebenaran nalar. Kebenaran faktual biasanya bersangkut paut dengan ada tidaknya secara faktual di dunia nyata sebagaimana dialami manusia (Sudarminta, 2002: 125). Kebenaran faktual berdasarkan pada faktualitas atau kesesuaiannya terhadap kenyataan. Sedangkan kebenaran nalar adalah kebenaran yang berdasar nalar atau logika. Kebenaran nalar merupakan kebenaran yang menegaskan kebenaran faktual. Kebenaran nalar dianggap tidak memberi pengetahuan baru karena berkedudukan sebagai penguat kebenaran faktual.

Selain kebenaran di atas, kebenaran juga dibedakan atas kebenaran ontologis dan kebenaran logis. Pembagian ini mengikuti pikiran Thomas Aquinas. Kebenaran ontologis adalah kebenaran yang ada di dalam kenyataan baik kenyataan yang bersifat material maupun spiritual (non fisik). Kebenaran logis adalah kebenaran yang diperantarai oleh akal budi. Kedudukannya tidak jauh berbeda dengan kebenaran nalar. Akal budi dalam hal ini berfungsi sebagai penegas kenyataan atau membuktikan kebenaran kenyataan.

Kaum eksistensialis menawarkan kebenaran eksistensialis sebagai sanggahan atas kebenaran materialis. Kebenaran eksistensialis dimaknai sebagai kebenaran subjektif. Kebenaran yang hanya dinilai dan diukur secara pribadi. Sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga bagi subjek maka patut dipertahankan dan digenggam erat sebagai kebenaran. Kebenaran eksistensialis bertumpu pada kualitas subjek. Subjek dalam hal ini dianggap sebagai penentu dalam menetapkan kebenaran. Subjek penahu bukanlah penonton yang anonim dan sama sekali tidak terlibat, tetapi seorang pribadi kongkret yang eksis (Sudarminta, 2002: 127).

Kebenaran suatu pengetahuan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber pengetahuan. Pendakuan kebenaran atas suatu pengetahuan bergantung pada perangkat atau sarana yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan. Kebenaran berdasarkan sumber pengetahuan manusia terbagi atas:

1. Korespondensi.
2. Koherensi.
3. Pragmatis.
4. Otoritatif.
5. Revelatif.

Di luar itu terdapat kebenaran yang lain, yakni kebenaran performatif dan kebenaran konsensus. Hubungan antara sumber pengetahuan dan validitas pengetahuan tampak dalam gambar berikut;

<u>Sumber-Sumber Pengetahuan</u>	<u>Validitas Kebenaran</u>
Indera	Korespondensi
Rasio/nalar	Koherensi
Intuisi	Intuitif
Otoritas	Otoritatif
Revelasi	Revelatif

Kebenaran korespondensi diperoleh dari seberapa jauh kebenaran ini bersesuaian atau berkorespondensi dengan fakta. Semakin mendekati fakta maka semakin mendekati benar. Sebaliknya, semakin menjauhi fakta maka semakin salah dan tidak dapat dipercaya. Validitas korespondensi ditemui dalam aliran empirisme yang mendakukan kebenaran pada pengalaman. Melalui observasi, kenyataan didekati dan diacu sebagai kebenaran.

Kebenaran koherensi tidak bersandarkan kepada fakta melainkan kepada hubungan sebab akibat suatu pernyataan. Sesuatu itu benar manakala antara satu dengan yang lain saling bersesuaian secara logis atau tidak saling bertentangan. Koherensi dipergunakan untuk memastikan kebenaran dalam rasionalisme.

Pragmatisme merupakan validitas kebenaran yang ditentukan oleh kepentingan atau sisi praksis dalam kehidupan. Semakin berdampak atau menghasilkan akibat yang besar secara praksis maka semakin kokoh diterima sebagai kebenaran.

Kebenaran pragmatis mengukur kebenaran berdasarkan kepentingan. Ide yang benar sekurang-kurangnya harus memiliki konsekuensi praktis pada tindakan tertentu (Keraf dan Mikhael, 2001: 71). Sesuatu dianggap benar jika memang berguna dan dapat dijadikan sebagai sarana memecahkan persoalan dalam kehidupan. Semakin pragmatis dan teruji di lapangan, dalam arti bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan kongkret maka semakin dianggap benar atau dapat dibenarkan. Kebenaran pragmatis menggunakan praktik sebagai dasar dalam mendakukan kebenaran. Ukuran yang digunakan adalah tingkat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan. Apakah usaha itu memenuhi harapan dan terbukti berhasil atau sebaliknya.

Kebenaran intuitif berada di luar pengalaman dan penalaran. Kebenaran ini diterima sebagai *insight* atau pengetahuan yang diterima langsung. Kebenaran intuitif bersifat *apriori* sehingga kebenaran intuitif sukar untuk dilacak atau ditelusuri tingkat kebenarannya. Kebenaran ini juga sangat subjektif dan

selektif mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan jenis ini.

Kebenaran otoritatif mendasarkan diri pada kekuatan otoritas atau kewenangan tertentu. Kebenaran ini sangat bergantung pada kedudukan seseorang dalam lingkup sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang atau semakin kredibel kapasitas seseorang maka semakin diakui segala sesuatu yang bersumber darinya dan diterima sebagai kebenaran. Otoritas menjadikan seseorang diikuti dan diindahkan, lebih jauh dipatuhi dan dijadikan sebagai panutan. Apapun yang diucapkan oleh pihak berwenang atau otoritatif diterima begitu saja sebagai sebuah kebenaran tanpa perlu dipertanyakan atau disanggah. Kebenaran revelatif mendakukan otoritasnya pada wahyu atau kitab suci (*revelation*). Semua yang berasal dari kitab suci dipercaya sebagai sumber kebenaran yang tidak terbantahkan.

Selanjutnya kebenaran performatif. Kebenaran performatif adalah kebenaran yang berlandaskan pada isi atau kualifikasi pernyataan yang diucapkan penutur. Sesuatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu mampu menciptakan kenyataan (Keraf dan Mikhael, 2001: 74). Ungkapan yang diucapkan tanpa diikuti realitas bukan ucapan yang bermakna. Ungkapan itu tidak berisi dan kehilangan keberartiannya. Pernyataan-pernyataan yang diungkap dalam kebenaran performatif

mengandung janji atau harapan yang mesti diwujudkan. Jika janji atau harapan itu tidak terealisasi maka pernyataan tersebut tidak bermakna sama sekali.

Kebenaran konsensus berpijak pada kesepakatan atau konsensus bersama. Sesuatu dianggap benar jika telah disepakati atau diterima sebagai konsensus. Kebenaran konsensus didahului atau melewati sejumlah persetujuan tertentu sebelum dinyatakan sebagai kebenaran. Ada kesepakatan maksimum atau mayoritas yang dicapai agar kebenaran tersebut dapat diakui sebagai kebenaran.

Dalam praktik di lapangan, pendakuan atas kebenaran ini tidak berlaku mutlak. Manusia cenderung menempatkan kriteria kebenaran sesuai masalah yang dihadapi. Setiap masalah mempunyai porsi kebenarannya masing-masing. Kriteria kebenaran digunakan manusia silih berganti sesuai kecenderungan manusia. Sebagian cenderung dominan pada satu kriteria, namun sebagian lain bebas memilih kriteria mana yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Seseorang bisa menjadi sangat empiris namun dalam kesempatan berbeda menjadi begitu rasionalis atau sebaliknya.

BAB IV

ANALISIS EPISTEMOLOGIS ATAS RESPON PUBLIK TERHADAP PANDEMI COVID-19

A. Tipologi Respon Publik terhadap Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mendapatkan reaksi dan respon beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat tiga tipe masyarakat yang dapat ditakar dari sikap dan perilakunya dalam merespon virus Corona, Pertama, kelompok yang bertindak masa bodoh dan acuh tak acuh. Mereka tidak meyakini keberadaan Covid-19. Kalaupun ada, mereka hanya menganggap virus Corona tidak lebih dari virus flu biasa dan tidak berbahaya. Situasi ini ditunjukkan melalui ungkapan-ungkapan sebagai berikut: (a) “Mengapa kita harus takut kepada corona, seharusnya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada corona”. (b) “Masak kita dilarang ketemu dengan orang lain?”. Imbauan *social distancing* (menjaga jarak) dimaknai kelompok ini sebagai upaya untuk memutus tali silaturahmi. Kelompok ini berdalih bahwa Islam melarang keras memutuskan tali silaturahmi. (c) “ini sudah tanda-tanda kiamat, sholat jamaah saja dilarang?” (Binti Awad, www.iainkendari.ac.id, diakses 27 Juni 2021).

Kedua, kelompok yang mengakui Covid-19 sebagai virus berbahaya. Kelompok ini mengetahui

dan menyadari sepenuhnya bahwa virus Corona merupakan virus mematikan yang berpotensi menyebabkan penderita kehilangan nyawanya. Mereka sangat waspada dan bersikap hati-hati dalam bersosialisasi. Penularan Covid-19 yang begitu cepat menjadikan kelompok ini sedemikian patuh dan disiplin mengikuti protokol kesehatan. Mereka aktif menyuarakan atau mengkampanyekan protokol kesehatan dan mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanggulangan Covid-19. Ketiga, kelompok yang berada pada situasi percaya dan tidak percaya. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan keberadaan Covid-19. Kendati demikian tetap mengkhawatirkan jika terjadi sesuatu pada dirinya atau orang-orang terdekatnya.

Kepala Dinas Kesehatan Cirebon, Edy Sugiarto membagi masyarakat dalam empat kelompok dalam merespons wabah COVID-19 dan *new normal*, sebagai berikut:

1. Kelompok *denial*. Kelompok yang memilih bersikap acuh dan tidak memerdulikan Covid-19. Mereka menolak mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
2. Kelompok *rejection*. Mereka menolak keberadaan virus Corona, Kelompok ini beranggapan bahwa Covid-19 adalah *hoax* dan dilatarbelakangi sejumlah

kepentingan seperti kepentingan ekonomi maupun politik. Lebih jauh, mereka menuding Covid-19 sebagai bagian dari proyek konspirasi global.

3. Kelompok *receptive*. Mereka menerima kenyataan bahwa virus Corona benar-benar eksis. Kelompok ini sangat patuh terhadap protokol kesehatan. Mereka peduli dengan semua upaya pencegahan Covid-19.
4. Kelompok *worried*. Mereka yang dilanda ketakutan atas virus ini (Empat Respon Masyarakat Terhadap Virus Corona dari Cuek hingga Menolak Fakta www.radarcirebon.com, diakses 5 Maret 2021).

Respon lain yang ditunjukkan sebagian masyarakat dalam menyikapi Covid-19 sebagai berikut:

1. Benar-benar mengerti dan mematuhi aturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang, sekalipun berada diluar rumah
2. Mengerti, namun karena berbagai hal, *terpaksa keluar rumah* dengan melanggar protokol kesehatan
3. Tak mau mengerti dan mengajak orang untuk mengikuti apa yang dia yakini tentang Covid-19 dan protokol kesehatan
4. Menyikapi kebijakan tentang penanganan Covid-19 dengan menghubungkannya dengan masalah politik, dan biasanya sikapnya tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah
5. Sangat percaya diri dengan prinsip nyawa di tangan Tuhan sehingga tidak ada perubahan perilaku dalam

kehidupan sehari-hari (Berbagai Respon Masyarakat Terhadap Covid-19 www.fisipol.uma.ac.id, diakses 3 Maret 2021).

Hasil survei menunjukkan, 69,6% responden di enam kota mengaitkan virus corona dengan aspek negatif seperti, berbahaya, menular, darurat, mematikan, menakutkan, khawatir, wabah, pandemi, dan penyakit (Perilaku Masyarakat Semakin Positif Hadapi Pandemi Covid-19 www.wartaekonomi.co.id, diakses 2 Februari 2021). Respon negatif publik merupakan potensi yang dapat diberdayakan guna mencegah Covid-19. Jika publik menganggap virus Corona berbahaya atau menular maka publik akan mengambil sikap untuk menghindar atau menjauhi virus tersebut. Respon masyarakat terhadap pandemi Covid-19 memerlukan pemahaman yang tepat karena perilaku masyarakat ditentukan oleh respon yang ditunjukkan publik terhadap pandemi Covid-19. Perilaku masyarakat sangat bergantung pada bagaimana publik merespon Covid-19.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tipologi respon publik terhadap pandemi Covid-19. Secara umum tipologi respon publik tersebut terbagi ke dalam;

1. Respon positif

Respon positif ditandai dengan sikap menerima fakta keberadaan virus Corona yang menyebabkan

pandemi Covid-19. Covid-19 diterima sebagai sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mereka menyadari penuh bahwa Covid-19 adalah penyakit menular yang beresiko pada kematian. Protokol kesehatan merupakan kebiasaan baru yang diterapkan secara konsisten dalam perilaku sehari-hari di masa pandemi.

2. Respon negatif

Respon negatif berupa penyangkalan. Mereka menolak kenyataan jika Covid-19 merupakan penyakit berbahaya. Mereka beranggapan bahwa virus Corona seperti virus flu biasa. Penyangkalan mereka terhadap Covid-19 tampak dalam perilaku abai atau acuh tak acuh dari protokol kesehatan. Mereka bahkan terang-terangan menolak untuk mematuhi protokol kesehatan dan cenderung membangkang.

3. Respon antara

Respon antara berada pada situasi skeptis yakni percaya dan tidak percaya. Mereka tidak sepenuhnya patuh pada protokol kesehatan. Kecenderungan yang umum adalah bersikap masa bodoh dan menganggap remeh protokol kesehatan. Mereka taat dan mematuhi protokol kesehatan hanya jika mereka berkepentingan dengan hal itu.

B. Telaah Epistemologi Respon Publik dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia termasuk Indonesia menimbulkan reaksi beragam. Masyarakat pada umumnya mengambil sikap antara percaya atau tidak percaya Covid-19. Publik yang menyangsikan keberadaan Covid-19 kerap bersikap acuh tak acuh terhadap imbauan atau kewajiban menaati protokol kesehatan. Sebaliknya, masyarakat yang percaya dan meyakini keberadaan Covid-19 memilih sikap waspada dan patuh pada protokol kesehatan. Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat berimbas pada upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Langkah pemerintah mengentaskan Covid-19 kerap terhalang oleh ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan.

Respon publik dalam menanggapi pandemi Covid-19 berkaitan erat dengan latar epistemologis setiap individu. Epistemologi menentukan bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari kapasitas (kuantitas dan kualitas) pengetahuan seseorang. Pengetahuan menggiring manusia untuk bertindak sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimilikinya. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa perilaku merupakan cerminan atau gambaran dari pengetahuan

seseorang. Sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat terhadap protokol kesehatan mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kebenaran yang diyakini dengan fakta atau kenyataan yang dihadapi.

Beragam respon yang ditampilkan publik terkait pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh sikap-sikap epistemologis seseorang dalam berpengetahuan, khususnya bagaimana seseorang mendakukan kebenaran dalam pengetahuan. Dalam epistemologi, pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya; indera, rasio, intuisi, otoritas dan revelasi. Pendakuan kebenaran sangat bergantung pada cara dan jalan yang ditempuh manusia dalam memperoleh pengetahuan.

Kebenaran yang diperoleh manusia melalui berbagai jalan atau sumber pengetahuan mempunyai kedudukan yang fundamental dalam hidup manusia. Sejak dahulu kala manusia terobsesi dengan kebenaran. Kebenaran sendiri dalam sejarah peradaban dunia terus diperbincangkan. Para filsuf sampai hari ini masih berkutut dengan persoalan kebenaran.

Manusia dalam berbagai kesempatan senantiasa memburu kebenaran. Mereka hendak memastikan apakah pengetahuannya adalah benar atau sebaliknya. Manusia menginginkan kejelasan dari setiap kenyataan yang dilaluinya. Semua hal yang meragukan

ditinggalkan dan dicarinya penjelasan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya dan diakui sebagai kebenaran.

Kebenaran diperjuangkan dan diperebutkan manusia lintas generasi. Konflik, perpecahan, dan penderitaan manusia kerap bersumber dari pendakuan akan kebenaran. Setiap manusia mempunyai pilihan sikap dalam meyakini kebenaran. Dengan kata lain, manusia tidak begitu saja mempercayai sesuatu sebagai kebenaran. Kebenaran yang diyakini manusia beragam. Tidak ada kebenaran tunggal yang didaku manusia kecuali kebenaran itu sendiri. Kebenaran manusia ditentukan oleh bagaimana manusia memformulasikan kebenaran itu.

Kebenaran mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena kebenaran diposisikan sebagai prinsip yang diacu manusia dalam berkehidupan. Kebenaran merupakan pedoman berpikir dan berperilaku manusia. Semua kemampuan manusia sejatinya diarahkan untuk memperoleh kebenaran. Kegiatan manusia seluruhnya bertopang pada kebenaran yang dipegang sebagai prinsip berkehidupan. Manusia tidak bisa berpaling dari kebenaran karena kebenaran merupakan keniscayaan bagi manusia.

Kebenaran cenderung subjektif dan terikat ruang dan waktu. Manusia menghendaki kebenaran seperti halnya pengetahuan yang dapat berlaku universal (van Peursen, 1991: 20). Universalitas kebenaran mengatasi

kebenaran parsial atau kebenaran berdasar pengalaman. Kebenaran universal membuka peluang bagi upaya memecahkan masalah yang merupakan persoalan bersama. Melalui perantaraan akal budi, persoalan atau masalah diabstraksi lepas dari pengalaman yang bersifat fisik dan jasmani.

Perkembangan zaman menghadapkan manusia pada problem kehidupan yang pelik. Masalah yang dihadapi manusia pun kompleks. Problem manusia dalam hal ini tidak cukup dihadapi dengan pengalaman individu. Manusia membutuhkan pengalaman bersama, kesepahaman dan kesepakatan bersama demi menuntaskan persoalan yang sebenarnya melibatkan banyak orang.

Covid-19 yang mewabah saat ini bukan semata-mata persoalan pribadi atau individu. Pandemi adalah persoalan bersama. Covid-19 yang melanda dunia dialami banyak orang lintas batas geografis. Seluruh dunia mengalami pandemi Covid-19. Upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi Covid-19 memerlukan komitmen dan kesadaran kolektif selain komitmen dan kesadaran pribadi.

Pengalaman pribadi para penyintas Covid-19 merupakan modal dasar bagi pengetahuan universal terkait Covid-19. Setiap pengalaman individu merupakan pengalaman berharga bagi pengetahuan bersama. Melalui pengalaman-pengalaman pribadi,

pengetahuan bersama disusun dan diorganisasikan agar memberikan manfaat optimal bagi upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19.

Respon publik terhadap pandemi Covid-19 tidak bisa dilepaskan dari bagaimana publik mendakukan kebenaran. Kebenaran yang didaku masyarakat menentukan sikap dan perilaku publik dalam merespon pandemi Covid-19. Respon publik merupakan representasi pengetahuan dan kebenaran yang diyakini masyarakat.

Manusia memperoleh pengetahuan dari pengalaman-pengalaman kongkret yang dilaluinya. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan manusia. Melalui inderanya, manusia menangkap realitas dan mendakukan kebenaran. Seluruh gejala yang dicerap indera merupakan kenyataan dan dianggap sebagai kebenaran. Manusia mempercayai sesuatu hanya jika sesuatu tersebut telah dibuktikan atau dialami secara langsung sebagai sebuah pengalaman pribadi. Sebaliknya, manusia akan menolak atau menyangkal sesuatu yang belum teruji atau dibuktikan lewat pengalamannya.

Manusia percaya bahwa pengetahuan bersumber dari daya indera dalam mencerp realitas. Indera memungkinkan manusia menangkap seluruh gejala-gejala yang ditampakkan kenyataan. Pengalaman memberikan gambaran kepada manusia tentang realitas.

Pengetahuan manusia terkait realitas diperoleh melalui hasil pengamatan dan pengalaman hidup manusia.

Kriteria kebenaran pengetahuan inderawi diukur berdasarkan fakta yang dapat diamati atau ditangkap panca indera. Semakin mendekati kenyataan atau bersesuaian dengan fakta maka semakin sesuatu itu benar atau dianggap benar. Kriteria kebenaran ini diistilahkan dengan korespondensi. Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika berkorespondensi (berhubungan) atau punya keterkaitan dengan fakta atau objek yang dituju pernyataan tersebut (Keraf dan Mikhael, 2001: 66).

Masyarakat menganggap Covid-19 atau pandemi Covid-19 sebagai kenyataan. Pandemi Covid-19 adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kesimpulan ini didapat dari situasi saat ini dimana pandemi tengah berlangsung dan menggejala hampir di seluruh wilayah tanah air. Masyarakat yang mengakui keberadaan Covid-19 atau pandemi Covid-19 umumnya telah mengalami atau berstatus positif Covid-19 sebelumnya. Mereka mengetahui dengan baik Covid-19, gejala dan apa yang dirasakan selama mengidap Covid-19. Para penyintas Covid-19 adalah orang-orang yang bertahan dari badai Covid-19.

Para penyintas Covid-19 mengalami secara langsung bagaimana terpaan Covid-19. Mereka hidup

sebagai *survivor* Covid-19. Pengalaman terpapar Covid-19 membuat mereka peduli dan *concern* terhadap setiap upaya pencegahan Covid-19. Mereka aktif menyuarakan pentingnya protokol kesehatan dan turut terlibat dalam kegiatan donor plasma bagi pasien Covid-19.

Dukungan terhadap usaha pemerintah mengatasi Covid-19 diberikan pula oleh mereka yang mengalami kehilangan orang-orang terdekat akibat Covid-19. Pengalaman mendapati orang-orang tercinta, kerabat dan saudaranya meninggal sebab Covid-19 menjadikan mereka percaya bahwa Covid-19 adalah penyakit yang berbahaya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kerabat mereka menderita dan meninggal dunia akibat Covid-19.

Seluruh pengalaman yang dialami secara langsung baik sebagai penyintas ataupun orang yang kehilangan sanak saudaranya akibat Covid-19 berdampak pada reaksi seseorang atau masyarakat dalam merespon pandemi Covid-19. Masyarakat cenderung memberi respon positif dalam menanggapi Covid-19. Perilaku yang ditunjukkan mengarah pada sikap waspada dan kehati-hatian. Mereka juga memberi dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 melalui kepatuhan menaati protokol kesehatan.

Pengalaman memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam merespon Covid-19. Respon negatif masyarakat terhadap Covid-19 juga didasarkan pada pengalaman bahwa mereka belum atau tidak terpajan Covid-19. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya terpapar Covid-19. Mereka juga tidak mengalami kehilangan sanak kerabat atau orang-orang yang dicintainya akibat Covid-19. Pengalaman ini membuat mereka mengambil berbeda dengan masyarakat yang mengalami langsung peristiwa Covid-19.

Sebagian masyarakat menolak atau menyangkal pandemi Covid-19 karena tidak memiliki pengalaman langsung terkait Covid-19. Mereka mengatakan bahwa Covid-19 adalah *hoax* atau kebohongan. Kenyataan bahwa mereka tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19 kendati tidak mematuhi protokol kesehatan membuat mereka menyatakan Covid-19 sebagai kebohongan.

Ketidakpercayaan publik yang berujung pada penolakan mematuhi protokol kesehatan atau tindak pembangkangan dipicu pula oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerbitkan maupun mengeksekusi kebijakan terkait Covid-19. Masyarakat mendapati bagaimana perilaku pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan aparaturnya yang menyalahi aturan dan tidak memberikan sanksi tegas bagi pelanggar aturan. Publik juga mengetahui dan mengalami langsung bagaimana perilaku rumah sakit yang

memanfaatkan situasi Covid-19 demi keuntungan pribadi.

Kasus mengcovidkan pasien yang dilakukan rumah sakit diperkuat oleh pernyataan pejabat dalam hal ini Kepala Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko menyatakan “...jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat Covid-19” (Moeldoko: RS Jangan Mudah Mengcovidkan Pasien Meninggal, www.gatra.com, diakses 1 Maret 2021). Pernyataan ini merupakan tanggapan dari kasus yang terungkap di lapangan terkait perilaku rumah sakit dalam merekayasa kondisi kematian pasien.

Pengetahuan berdasarkan pengalaman menghasilkan dua respon berbeda yakni positif dan negatif. Kebenaran dalam hal ini ditentukan oleh pengalaman masing-masing. Semakin kaya pengalaman semakin arif dalam bersikap dan berperilaku terutamanya dalam merespon Covid-19.

Pengalaman empiris memberi dasar bagi manusia dalam berpengetahuan. Demikian pula dengan pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional bertopang pada hasil penalaran manusia. Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses berpikir atau bernalar secara rasional. Pengalaman yang merupakan dasar bagi empirisme atau mereka yang mendakukan kebenaran secara korespondensi dinilai

tidak cukup atau kurang memadai untuk menghasilkan pengetahuan.

Pengalaman menurut rasionalisme tidak membuahkan prinsip dan justru sebaliknya. Prinsip diperoleh melalui penalaran sehingga pengetahuan tentang kejadian atau peristiwa yang berlaku di alam dapat diketahui (Suriasumantri, 2007: 51). Melalui penalaran secara logis yakni menghubungkan antara pengalaman dan realitas dengan ide yang apriori, manusia mampu memperoleh pengetahuan.

Kriteria kebenaran dalam rasionalisme disebut dengan koherensi. Koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dengan pernyataan lain harus saling bersesuaian, saling meneguhkan (koheren) dan berkaitan (Keraf dan Mikhael, 2001: 68). Setiap pernyataan hendaknya konsisten satu sama lain dan tidak saling bertolak belakang atau bertentangan. Jika ditemukan suatu pernyataan berbeda dengan pernyataan yang lain maka pernyataan tersebut dianggap tidak logis.

Pandemi Covid-19 adalah wabah yang menyerang tidak hanya masyarakat di Indonesia namun juga seluruh dunia. Informasi tentang Covid-19 memenuhi sebagian besar media baik cetak, televisi maupun digital. Tidak sulit menemukan informasi terkait Covid-19 dalam situasi hari ini. Informasi yang membanjiri

media menjadikan masyarakat tahu betul bagaimana pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Informasi yang diperoleh masyarakat melalui sejumlah media diperkuat oleh kenyataan lapangan. Pandemi Covid-19 sejak awal diindikasikan akan berimbas ke berbagai aspek kehidupan manusia. Problem Covid-19 bukan semata-mata problem kesehatan. *Multiplier effect* dari Covid-19 berdampak ke berbagai sektor lain seperti ekonomi, politik dan sosial budaya. Tingkat penularan Covid-19 yang begitu cepat dan mudah disikapi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan.

Kebijakan protokol kesehatan atau yang dikenal dengan 3M; memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak mengubah daur hidup dan rutinitas masyarakat. Seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari protokol kesehatan. Protokol kesehatan bahkan dicanangkan pemerintah sebagai bentuk habitus atau kebiasaan baru masyarakat.

Protokol kesehatan memengaruhi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Tatanan kehidupan masyarakat bergeser ke dalam norma baru selama pandemi Covid-19. Kenyataan ini cukup memberi alasan bahwa pandemi Covid-19 beserta resiko yang ditimbulkannya mesti disikapi dengan tepat.

Publik melakukan penilaian atas berbagai informasi yang diterima. Mereka menghubungkan satu peristiwa dengan informasi yang berkaitan dengannya. Dengan jalan ini masyarakat mengambil sikap dan pilihan bagaimana seharusnya merespon pandemi Covid-19. Fakta lapangan beserta informasi yang ada merupakan bahan pertimbangan publik dalam memutuskan sikapnya.

Namun demikian publik juga menyaksikan fakta yang tidak bersesuaian dengan pernyataan yang diungkapkan oleh sejumlah pejabat. Publik juga mendapati informasi yang tidak relevan atau tepat dengan situasi pandemi. Kondisi ini menyebabkan publik bereaksi negatif dan memilih menolak patuh terhadap kebijakan pemerintah.

Informasi yang tidak tepat seputar pandemi Covid-19 menimbulkan kebingungan masyarakat. Masyarakat kesulitan mendakukan kebenaran secara logis karena tidak ada informasi akurat yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kesimpangsiuran ini menyebabkan masyarakat berada pada posisi rentan karena tidak memiliki acuan yang bisa dipercaya. Sikap yang ditunjukkan masyarakat pada posisi ini lebih pada sikap abai dan tidak memerdulikan protokol kesehatan.

Pengetahuan intuitif merupakan pengetahuan yang diterima secara langsung tanpa terlebih dahulu dipikirkan atau dialami sebagai pengalaman. Intuisi

menurut Suriasumantri (2007: 53) adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran tertentu. Pengetahuan ini berbeda dengan pengetahuan sebelumnya yang bersandar pada pengalaman inderawi dan pemikiran logis. Manusia memperoleh pengetahuan ini secara tiba-tiba atau tidak terduga. Pengetahuan ini hadir dan diterima manusia begitu saja. Manusia bahkan tidak bisa memprediksi atau meramalkan pengetahuan ini. Intuisi bekerja dalam keadaan manusia yang tidak sepenuhnya sadar (Suriasumantri, 2007: 53).

Pengetahuan intuitif dapat berupa suara hati yang bersumber dari nurani atau ilham. Pengetahuan intuitif sangat bersifat pribadi dan personal. Tidak semua orang bisa mendapatkan pengetahuan ini. Kebenaran yang dihasilkan oleh pengetahuan intuitif adalah kebenaran subjektif. Subjektivitas yang kental dalam pengetahuan intuitif menjadikan pengetahuan ini relatif.

Dalam konteks pengetahuan intuitif, pandemi Covid-19 diterima begitu saja sebagai kenyataan. Mereka tidak mempermasalahkan latar belakang Covid-19 atau mendalami Covid-19. Bagi mereka Covid-19 adalah realitas yang tidak bisa ditolak dan mesti dijalani. Sikap mereka terhadap protokol kesehatan terbilang aktif. Mereka patuh bukan karena pengalaman melainkan karena mengikuti keyakinannya sendiri. Nurani mereka menyeru untuk melindungi diri dari ancaman Covid-19. Maka jalan yang ditempuh

adalah patuh pada protokol kesehatan demi terhindar dari Covid-19.

Pengetahuan otoritatif adalah pengetahuan yang bersandar pada otoritas atau kewenangan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan yang disampaikan oleh atau bersumber dari pihak berwenang dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dan status sosial tertentu di masyarakat dianggap sebagai pengetahuan yang benar. Kebenaran yang disandarkan pada pengetahuan otoritatif ini sangat bergantung pada sejauh mana kualifikasi yang dimiliki oleh pemberi pesan. Kualifikasi ini bisa berupa senioritas atau yang dituakan (sesepuh), ahli atau pakar, dan pemuka pada bidang-bidang spesifik.

Informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut umumnya bisa diterima dan dipercaya oleh publik sebagai kebenaran. Publik yang basis pengetahuannya berlatar otoritas cenderung mencari informasi dari pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan dalam bidang tersebut. Mereka menolak percaya informasi yang tidak disampaikan atau bersumber dari otoritas tersebut.

Masyarakat mematuhi protokol kesehatan karena masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan relevan dari sumber terpercaya. Mereka tidak hanya mendengarkan namun juga mematuhi apa yang diserukan oleh pengambil kebijakan yang kompeten.

Informasi perihal Covid-19 dinilai benar jika disampaikan oleh tenaga medis, pihak yang paling kredibel dalam menginformasikan dan menjelaskan Covid-19.

Pengetahuan berdasar otoritas menemukan kesulitan ketika pihak-pihak yang mempunyai otoritas menyampaikan informasi yang berbeda atau cenderung berseberangan. Situasi ini tentu menimbulkan kebingungan masyarakat. Sejumlah perdebatan mewarnai isu pandemi Covid-19 dan itu datang dari para ahli. Di sisi lain, para pengambil kebijakan tampak saling bertolak belakang dalam memberi pendapat maupun memutus suatu kebijakan.

Penentuan prioritas apakah kesehatan atau ekonomi berimplikasi pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan ini menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Di masa pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif wisata dengan dukungan pemengaruh. Pemerintah melarang masyarakat berpergian namun di sisi lain memberikan ijin bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia. Masyarakat menganggap pemerintah sebagai pihak otoritatif atau berwenang dalam upaya menangani Covid-19. Namun pemerintah justru mengambil kebijakan yang kontraproduktif.

Problem otoritas ini juga bersinggungan dengan kebijakan vaksin Covid-19. Para ahli saling berbeda

pendapat. Mereka tidak mempunyai kesepakatan apakah vaksin Corona layak atau tidak. Dalam situasi ini, publik dihadapkan pada situasi yang rumit. Otoritas mana yang bisa dipercaya dalam menjelaskan Covid-19.

Isu vaksin berkembang luas, sejumlah pihak menyatakan penolakannya terhadap program vaksin Covid-19. Pemerintah dinilai memaksakan program vaksin tanpa menguji kelayakannya terlebih dahulu secara memadai. Pemaksaan ini lantas dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah tidak boleh memaksakan vaksin kepada warga.

Perdebatan yang terjadi perihal vaksin Covid-19 berimplikasi pada penolakan vaksin. Argumen yang dikemukakan publik merujuk pada perdebatan para pakar dan pengambil kebijakan. Masyarakat menimbang bahwa vaksin Covid-19 belum layak dan tidak memberi kepastian dalam mengantisipasi Covid-19.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Keberadaan agama-agama di Indonesia menunjukkan bahwa kitab suci merupakan pedoman bagi umat beragama. Agama merupakan pengetahuan yang mencakup pengalaman dan masalah-masalah transendental (Suriasumantri 2007: 54). Pengetahuan revelatif memosisikan kitab suci sebagai sumber utama kebenaran. Suatu pernyataan menurut Suriasumantri

(2007: 54) mesti dipercaya dulu sebelum diterima. Mereka meyakini bahwa informasi kitab suci adalah benar. Mereka tunduk dan patuh terhadap isi dari kitab suci.

Masyarakat berlatar pengetahuan revelatif cenderung menghubungkan realitas dengan informasi kitab suci. Kitab suci dalam posisi ini diposisikan sebagai legitimasi kenyataan yang umumnya diterima tanpa syarat. Masyarakat menerima begitu saja realitas sejauh dijelaskan berdasarkan ayat-ayat kitab suci.

Masyarakat berpengetahuan revelatif merujuk pada referensi kitab suci dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam perspektif kitab suci, pandemi Covid-19 dipandang sebagai musibah, ujian bagi orang beriman atau azab yang menunjukkan murka tuhan. Pandangan ini mewarnai perspektif umat beragama dalam menanggapi Covid-19. Pandangan ini sangat memengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat di masa pandemi.

Kitab suci bagi masyarakat merupakan pedoman dan tuntunan dalam menghadapi dan menyikapi berbagai situasi dan kondisi kehidupan termasuk pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, masyarakat secara aktif mengikuti tuntunan kitab suci yang diserukan melalui perantaraan pemuka agama. Pemuka agama dalam hal ini berperan sentral dalam menransmisikan pengetahuan yang bersumber dari

kitab suci. Mereka mempunyai kedudukan yang otoritatif di tengah-tengah umat dan menjadi figur panutan dalam menyikapi pandemi Covid-19.

Masyarakat menanggapi pandemi Covid-19 dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa sesuai tuntunan agama masing-masing. Mereka pasrah dan menerima pandemi Covid-19 sebagai musibah yang mesti dilalui. Seruan kitab suci untuk menjaga diri dipenuhi melalui perilaku mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Protokol kesehatan dianggap sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar manusia mengatasi pandemi Covid-19.

Kepatuhan terhadap protokol kesehatan disadari sebagai bagian dari ketaatan terhadap kitab suci. Kepatuhan masyarakat ini dinilai sebagai bentuk ketaatan kepada *ulil amri*. Namun demikian, ditemukan sejumlah reaksi yang berbeda dalam menafsirkan tuntunan kitab suci. Masyarakat mengabaikan dan menolak mematuhi protokol kesehatan bersandar pada keyakinan bahwa kematian bisa saja terjadi dimana saja.

Penolakan ini terjadi karena masyarakat berlandung dibalik interpretasinya sendiri terhadap kitab suci. Mereka begitu percaya diri dengan berargumen bahwa kematian merupakan urusan Tuhan. Covid-19 bukan penyebab kematian melainkan takdir Tuhan. Sikap yang ditampilkan pada umumnya

mengabaikan dan enggan peduli terhadap protokol kesehatan. Tidak tampak perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Berbagai Respon Masyarakat Terhadap Covid-19 www.fisipol.uma.ac.id, diakses 3 Maret 2021).

Mereka beranggapan bahwa sikap kita selama pandemi Covid-19 dinilai berlebihan. Kematian menurut mereka bukan disebabkan oleh Covid-19 melainkan kehendak Tuhan atau takdir yang diterima manusia. Penularan Covid-19 lebih karena ketentuan Tuhan dan bukan karena ketidakpatuhan terhadap Covid-19. Anggapan ini berujung pada sikap dan perilaku memandang remeh protokol kesehatan.

Sikap dan perilaku masyarakat dalam menanggapi pandemi Covid-19 sangat beragam. Sikap ini ditentukan dan dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap Covid-19. Patuh dan menaati protokol kesehatan bagi sebagian masyarakat merupakan sikap yang tepat. Resiko terpapar Covid-19 dapat diminimalkan melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Perilaku ini merupakan bagian dari langkah pencegahan Covid-19 yang diupayakan pemerintah selama pandemi.

Publik menilai bahwa protokol kesehatan memberi manfaat yang signifikan bagi penanggulangan Covid-19. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan modal utama bagi upaya mengentaskan

Covid-19. Resiko terburuk yakni terpapar Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 dapat diantisipasi melalui konsistensi penerapan protokol kesehatan.

Masyarakat merasakan betul dampak pandemi Covid-19. Dampak pandemi tidak hanya pada aspek kesehatan namun juga ekonomi. Penularan Covid-19 yang sedemikian cepat dan masif menuntut setiap orang untuk peduli dan *concern* pada upaya pencegahan. Kebijakan *social distancing* dan pembatasan wilayah memengaruhi perekonomian masyarakat. Situasi ini memicu publik untuk aktif mengupayakan penanggulangan pandemi demi tujuan praksis yakni agar ekonomi kembali pulih.

Kesadaran masyarakat akan arti penting protokol kesehatan merupakan bagian dari kebenaran pragmatis. Masyarakat bersikap patuh karena kepatuhan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan sehingga kepatuhan tersebut dianggap benar untuk dijalankan (Suriasumantri, 2007: 59). Pada situasi yang lain, ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan bisa dibenarkan. Masyarakat menilai bahwa kepatuhan pada protokol tidak merubah keadaan. Situasi dalam pandemi Covid-19 justru dinilai semakin pelik.

Penerapan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembatasan wilayah dianggap menyulitkan masyarakat dalam bermatapencarian. Pembatasan itu berefek

pada kegiatan ekonomi masyarakat baik secara makro maupun mikro. Masyarakat merasa bahwa pembatasan wilayah membatasi lingkup dan ruang gerak masyarakat dalam berusaha. Lebih jauh kebijakan ini dianggap mematikan usaha masyarakat terutama usaha kecil menengah.

Kebijakan pemerintah terkait pemberian bantuan sosial ekonomi demi meredam gejolak ekonomi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Masyarakat merasa bahwa bantuan itu tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Situasi ini membuat masyarakat menolak kebijakan pemerintah dan mengambil tindakan membangkang atau menolak patuh aturan yang ditetapkan pemerintah.

Suatu pernyataan dalam konteks kebenaran performatif dianggap benar jika pernyataan tersebut bisa menciptakan realitas. Kebenaran performatif bertumpu pada pernyataan yang membuahkan harapan. Pernyataan yang mengungkap kenyataan merupakan pernyataan yang bermakna.

Pernyataan yang diungkapkan oleh para pengambil kebijakan dinilai masyarakat tidak konsisten dan berubah-ubah. Publik sulit mempercayai pernyataan yang diucapkan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Pemerintah melalui aparaturnya kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan membingungkan masyarakat.

Pernyataan yang keluar dari pejabat negara jauh dari kenyataan. Pernyataan ini dalam konteks kebenaran performatif tidak memiliki makna dan keberartian. Masyarakat menolak percaya pada pemerintah dan mengambil sikap resisten terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah pernyataan yang dinilai publik tidak tepat antara lain:

Pernyataan Presiden

1. Pernyataan berkaitan dengan mudik dan pulang kampung.
2. Meminta masyarakat berdamai dengan Covid-19.

Pernyataan Menkopolkam

Corona is like your wife.

Pernyataan Menko Perekonomian

Izinnya membeli virus Corona tidak bisa masuk ke Indonesia

Pernyataan Menteri Perhubungan

Masyarakat Indonesia kebal terhadap virus Corona karena gemar makan nasi kucing.

Pernyataan Menteri Kesehatan

1. Orang Indonesia tidak akan tertular Covid-19.
2. Virus Corona belum terdeteksi di Indonesia.
3. Menuduh masyarakat sebagai penyebab kelangkaan serta kenaikan harga masker karena membeli masker.
4. Misinformasi terkait pasien pertama dan kedua Covid-19.

5. Doa penyebab virus Corona tidak masuk ke Indonesia (Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19, www.nasional.kompas.co.id diakses 2 Maret 2021).

Seluruh pernyataan yang dikemukakan pejabat negara menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian menganggap bahwa pernyataan itu sebatas kelakar, sebagian lain justru menyayangkan pernyataan tersebut. Masyarakat menilai bahwa pernyataan itu tidak layak diucapkan oleh pejabat negara yang bertanggung jawab penuh dalam mencegah penularan Covid-19.

Masyarakat menuntut para pengambil kebijakan untuk arif dalam memberi pernyataan ke publik. Hal ini penting agar publik mendapatkan pesan yang jelas dari pembuat keputusan. Berkelakar dalam situasi pandemi Covid-19 tidak bisa dibenarkan mengingat pandemi Covid-19 adalah masalah serius sehingga ucapan yang keluar sebisa mungkin memberi harapan kepada masyarakat.

Kebenaran konsensus mendasarkan diri pada kesepakatan bersama. Sesuatu itu dianggap benar jika beroleh persetujuan mayoritas. Kebenaran konsensus merupakan kebenaran kolektif. Kebenaran ini bertopang pada suara umum masyarakat.

Covid-19 atau pandemi Covid-19 bukan semata-mata urusan pemerintah. Pandemi Covid-19 adalah

tanggung jawab bersama. Covid-19 dalam hal ini merupakan *common enemy* (musuh bersama). Semua pihak tanpa terkecuali terlibat dan terkait dengan urusan Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan seluruh komponen masyarakat.

Virus Corona dan pandemi Covid-19 dipahami bersama sebagai masalah (konsensus). Masyarakat menyadari bahwa upaya pencegahan Covid-19 tidak bisa tidak memerlukan kerjasama dari seluruh pihak. Pemerintah tidak bisa mengupayakan pemulihan masalah tanpa dukungan masyarakat luas. Pemerintah dan masyarakat pada situasi ini harus saling mendukung satu sama lain demi keberhasilan upaya penanggulangan Covid-19.

Respon publik terhadap pandemi Covid-19 pada hakikatnya melibatkan semua sumber pengetahuan beserta validitasnya. Dalam berbagai kesempatan tampak dominasi dari salah satu sumber pengetahuan dengan validitas kebenarannya. Namun hal itu tidak berlaku absolut dalam arti diposisikan sebagai satu-satunya pertimbangan. Publik cenderung memosisikan sumber pengetahuan sesuai dengan masalah yang dihadapi.

C. Bagaimana Sikap Kita Selanjutnya?

Mencermati berbagai respon masyarakat dalam menanggapi Covid-19 maka diperlukan sejumlah

strategi yang dapat diterapkan dalam rangka menangani Covid-19 dengan mendasarkan diri pada basis epistemologi yang berkembang di masyarakat. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan Inderawi – Empirisme

Masyarakat dengan basis epistemologi empiris sangat meyakini fakta dan data sebagai acuan dalam mendakukan kebenaran maka strategi yang bisa dilakukan adalah memvalidasi seluruh data yang ada untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Data ini sangat penting karena dengan data, publik mengambil keputusan dan menentukan sikap apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa semua data yang tersosialisasi ke publik baik negatif dan positif adalah benar. Benar disini artinya bisa dibuktikan dan ditemukan faktanya (diobservasi) secara langsung. Masyarakat membutuhkan fakta dan bukan pernyataan yang tanpa isi. Maka seyogyanya seluruh pernyataan yang keluar telah terverifikasi kebenarannya.

Pemerintah perlu mengatasi semua berita *hoax* atau bohong perihal Covid-19 agar publik memiliki kepastian dan tidak kebingungan dalam mengambil keputusan dan sikap selama pandemi Covid-19.

2. Pengetahuan Rasio – Rasionalisme

Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan keterangan yang logis dan rasional terkait kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus merupakan kebijakan yang matang dan dikaji secara seksama. Rasionalisasi ini penting agar publik benar-benar memahami kebijakan pemerintah dari hilir ke hulu.

Pemerintah juga harus konsisten dalam mengeksekusi kebijakan yang dibuatnya sendiri. Publik menilai pemerintah selama ini tidak tertib dalam menerapkan kebijakan pengendalian Covid-19. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan resistensi publik terkait kebijakan Covid-19. Banyak aturan yang dilanggar oleh pejabat pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Situasi ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah agar kebijakan penanganan Covid-19 dapat berjalan optimal.

3. Pengetahuan Intuitif

Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kesadaran masyarakat akan arti penting protokol kesehatan melalui sosialisasi terpadu dengan melibatkan berbagai komponen. Resiko buruk dari pandemi Covid-19 harus terus menerus disampaikan ke publik agar publik mempunyai kesadaran untuk

peduli terhadap dirinya dan orang lain melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

4. Pengetahuan Otoritatif

Masyarakat dalam konteks pengetahuan otoritatif menggantungkan kebenaran pada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan tertentu. Pemerintah dalam hal ini diposisikan sebagai pihak yang berwenang dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19. Sebagai pihak yang dipercaya memiliki otoritas, pemerintah perlu memastikan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari pemerintah adalah benar adanya.

Pemerintah baik pusat dan daerah hendaknya memiliki kesepahaman bersama sehingga kebijakan pemerintah dari pusat dan daerah sama dan tidak saling bertolak belakang atau bahkan saling menegasikan. Pemerintah juga perlu mengimbau pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan penanganan Covid-19 agar memiliki suara yang sama. Hal ini dilakukan untuk menjamin informasi yang disampaikan *qualified*.

Pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini tenaga medis diminta merumuskan dengan cermat semua kemungkinan yang ada agar informasi yang disampaikan terjamin kebenarannya. Pemerintah juga perlu meminta dukungan dari semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat agar

bersama-sama mendukung upaya penanganan Covid-19. Semua otoritas yang ada semaksimal mungkin diarahkan kepada usaha mengatasi pandemi Covid-19. Dengan sinergisitas yang melibatkan seluruh komponen diharapkan upaya bersama mengatasi Covid-19 dapat berjalan dengan baik.

5. Pengetahuan Revelatif

Pengetahuan revelatif berhubungan erat dengan kondisi masyarakat yang religius. Masyarakat religius umumnya mempercayai dengan ajaran agamanya dengan baik. Seluruh aktivitas keseharian masyarakat dijalankan dengan merunut pada ajaran kitab suci. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pemuka agama. Hal ini penting dilakukan karena pemuka agama mempunyai kedudukan sentral di tengah-tengah umat beragama. Pemuka agama dianggap sebagai pihak yang berwenang dalam menyampaikan ajaran-ajaran kitab suci.

Upaya pemerintah menangani Covid-19 sejalan dengan perintah agama. Agama menyeru manusia untuk memelihara diri dengan baik. Protokol kesehatan sejauh ini dianggap sebagai upaya yang tepat dalam mengurangi angka penularan Covid-19 di masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan pemuka agama diharapkan akan memperkuat upaya penanganan Covid-19. Pemerintah dan pemuka agama perlu berdiri sejajar dan saling mengambil

inisiatif sesuai kapasitas masing-masing demi mengatasi pandemi Covid-19.

6. Pengetahuan Pragmatis

Pengetahuan pragmatis mengukur kebenaran dari segi fungsional atau manfaat. Sesuatu dianggap penting atau benar hanya jika sesuatu itu berguna. Pemerintah dalam situasi ini perlu menyosialisasikan urgensi dan kepentingan setiap kebijakan pemerintah kepada publik. Masyarakat harus mengetahui benar apa manfaat yang diperoleh melalui kebijakan pemerintah.

Dukungan masyarakat akan diberikan jika publik percaya bahwa kebijakan pemerintah benar-benar membawa manfaat dan bukan justru sebaliknya, menyulitkan masyarakat. Hal-hal yang sekiranya menyulitkan masyarakat sesegara mungkin diantisipasi dan dicarikan jalan keluar yang tepat agar publik mendapatkan kemanfaatan optimal dari kebijakan pemerintah terkait Covid-19.

Penolakan publik terhadap kebijakan pemerintah selama ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan pemerintah justru menyulitkan masyarakat. Pemerintah dinilai tidak memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini kerap tidak tepat sasaran. Situasi ini kemudian berdampak pada ketidakpercayaan publik kepada

pemerintah yang ditunjukkan dengan ketidakpatuhan pada protokol kesehatan.

7. Kebenaran Performatif

Kebenaran performatif berkaitan dengan pernyataan yang diungkapkan ke publik. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan ke muka masyarakat. Selama pandemi ini, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah cenderung kontroversial. Pernyataan ini jauh dari kenyataan atau bertolak belakang dengan realitas di lapangan.

Situasi ini tentu memperumit atau menyulitkan masyarakat. Publik mengalami kebingungan dan kebingungan dalam mengambil sikap di masa pandemi ini. Pemerintah perlu meminimalkan pernyataan-pernyataan yang tidak tepat demi mengurangi kesimpangsiuran di tengah-tengah masyarakat. Para pejabat dan pengambil kebijakan seyogyanya bertindak arif dalam berpendapat dan mengomentari sesuatu yang bukan kewenangannya atau bukan pada tempatnya. Hal ini semata-mata dilakukan agar publik memperoleh informasi yang benar tentang Covid-19.

8. Kebenaran Konsensus

Kebenaran konsensus diperoleh melalui kesepakatan atau persetujuan bersama tentang sesuatu hal. Sebelum bertindak perlu disepakati bersama bahwa Covid-19 merupakan masalah

bersama (*common enemy*). Kesepakatan ini penting sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Melalui kesepakatan ini pula kerjasama dengan berbagai pihak sangat dimungkinkan.

Kegagalan upaya pencegahan Covid-19 seringkali disebabkan oleh anggapan bahwa Covid-19 adalah urusan pemerintah. Publik merasa tidak perlu terlibat dalam upaya tersebut. Dengan menyepakati Covid-19 sebagai musuh bersama maka peluang untuk mengatasi Covid-19 terbuka lebar.

Kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 perlu mendapatkan kesepakatan bersama. Pemerintah seyogyanya tidak bertindak sepihak dalam mengeluarkan kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 diperuntukkan bagi seluruh warga maka kebijakan tersebut perlu mendapatkan persetujuan masyarakat.

Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dalam kebijakan penanganan Covid-19. Peran publik sangat besar dalam menyukseskan kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu memberikan porsi dan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Prioritas utama pemerintah adalah rakyat maka sebisa mungkin seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memosisikan rakyat sebagai pusat sekaligus tujuan akhir dari kebijakan penanganan Covid-19. Pemerintah perlu mengoreksi diri dan

tidak menempatkan publik sebagai musuh. Rakyat adalah partner pemerintah. Upaya penanganan Covid-19 mustahil memberikan hasil yang nyata tanpa kerjasama aktif antara pemerintah dan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang dirasakan banyak negara termasuk Indonesia menimbulkan dampak yang luar biasa. Seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali terimbas pandemi Covid-19. Situasi yang serba tidak menentu akibat Covid-19 memperoleh respon beragam dari masyarakat. Berbagai respon yang ditunjukkan publik terhadap pandemi secara garis besar dibedakan atas respon positif, respon negatif dan respon antara.

Respon positif tampil dalam sikap menerima Covid-19 sebagai penyakit berbahaya yang memotensikan kematian. Masyarakat dalam hal ini menyadari penuh dampak dan resiko yang ditimbulkan Covid-19. Mereka patuh mengikuti protokol kesehatan dan sangat peduli pada upaya penanggulangan Covid-19. Respon negatif ditunjukkan melalui sikap menolak atau menyangkal keberadaan Covid-19 sebagai penyakit mematikan. Perilaku yang umum adalah tidak disiplin atau bahkan menolak mematuhi protokol kesehatan. Respon antara berupa sikap percaya atau tidak percaya Covid-19. Perilaku mereka cenderung *ignorant* atau tidak peduli terhadap protokol kesehatan.

Penolakan masyarakat terhadap Covid-19 didasarkan pada sejumlah alasan yakni menganggap Covid-19 sebagai *hoax* atau konspirasi, tidak memperoleh informasi memadai perihal Covid-19 atau mendapat informasi yang tepat dari pihak berwenang, tidak bersentuhan langsung atau mengalami paparan Covid-19 dan mengandalkan keyakinan yang salah atau keliru.

Telaah epistemologis atas respon publik terhadap pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut;

Pertama, kelompok empiris.

Kelompok ini mendakukan kebenaran pada fakta atau realitas aktual. Mereka menganggap sesuatu itu benar dan dapat dipercaya hanya jika sesuatu itu faktual. Masyarakat dengan tipe ini mempercayai keberadaan Covid-19 setelah terpapar dan mengalami secara langsung Covid-19.

Kedua, kelompok rasionalis.

Kelompok rasionalis memperoleh kebenaran melalui penalaran atau pemikiran logis. Masyarakat dalam tipe ini mengumpulkan dan mencerna berbagai informasi yang relevan terkait Covid-19. Data-data lapangan dielaborasi untuk ditemukan kesesuaiannya masing-masing (koherensi). Melalui data-data tersebut, publik percaya bahwa Covid-19 adalah penyakit menular berbahaya yang patut dihindari.

Ketiga, kelompok intuitif

Kelompok ini berbeda dengan kelompok sebelumnya, empiris dan rasionalis. Kelompok intuitif menerima begitu saja Covid-19 sebagai suatu keniscayaan atau sesuatu yang memang sudah seharusnya. Mereka tidak memperdulikan atau merisaukan latar belakang Covid-19.

Keempat, kelompok otoritas

Kelompok ini mengandalkan otoritas sebagai sumber atau penyangga kebenaran. Mereka mempercayai informasi seputar Covid-19 hanya jika disampaikan oleh pakar atau orang yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Kelompok ini serupa dengan kelompok yang mendakukan kebenaran secara performatif. Kelompok performatif mempertimbangkan status penutur atau penyampai pesan. Informasi perihal Covid-19 diterima hanya jika disampaikan oleh kalangan medis atau profesi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kelima, kelompok revelatif

Kelompok revelatif mengaitkan Covid-19 dengan keterangan yang bersumber dari kitab suci. Mereka menganggap Covid-19 sebagai ujian, musibah atau bahkan azab. Kecenderungan yang tampak adalah penggunaan argumen teologis dominan demi melegitimasi tindakan atau perilaku mereka di masa

pandemi. Pemuka agama memiliki kedudukan sentral dalam mengorientasikan kebenaran pada kelompok ini.

Respon publik yang ditunjukkan oleh masing-masing kelompok ditentukan oleh latar epistemologis dari kelompok-kelompok tersebut. Kelompok empiris menerima Covid-19 sebagai fakta hanya jika mereka telah membuktikan terlebih dahulu melalui pengalaman langsung terpapar Covid-19. Pengalaman sebagai penyintas Covid-19 membuat mereka *concern*, bersikap hati-hati dan patuh pada protokol kesehatan. Sebaliknya, mereka akan menyangkal jika tidak atau belum terpajan penyakit tersebut dan menolak mematuhi protokol kesehatan.

Covid-19 bagi kelompok rasionalis merupakan kenyataan yang masuk akal (ilmiah). Tidak sulit bagi kelompok ini untuk menerima Covid-19 mengingat tersedia banyak fakta dan data tentang Covid-19 dari sejumlah pakar, pasien maupun para penyintas Covid-19. Kelompok rasionalis cenderung patuh pada protokol kesehatan karena mengetahui dengan baik dampak atau resiko Covid-19. Kelompok intuitif kerap bersikap skeptis dalam arti tidak terlalu memusingkan atau menganggap penting Covid-19. Sikap yang ditunjukkan cenderung mengikuti arus atau mengikuti apa yang menjadi keyakinannya sendiri. Perilaku kelompok intuitif sukar diprediksi, mereka bias berada

pada posisi mendukung protokol kesehatan atau sebaliknya.

Kelompok otoritas mengandalkan sumber informasi yang otoritatif dan kredibel. Sikap mereka terhadap Covid-19 sangat dipengaruhi oleh kualifikasi pemberi pesan. Mereka cenderung patuh dan mengikuti instruksi yang disampaikan pihak berwenang. Kelompok performatif mendasarkan kebenaran pada kualitas pernyataan. Pernyataan yang bisa dibuktikan dalam hal ini menghasilkan kenyataan dianggap sebagai benar. Selama pandemi pernyataan yang dikemukakan pengambil kebijakan cenderung kontroversial. Situasi ini jelas membingungkan masyarakat. Sikap yang kemudian ditunjukkan adalah apatis atau meremehkan mengingat pemerintah dinilai tidak bisa dipercaya.

Kelompok revelatif menganggap Covid-19 berkaitan erat dengan ketaatan manusia terhadap Tuhannya. Covid-19 merupakan ujian yang diperuntukkan bagi orang-orang yang taat dan sebaliknya azab bagi mereka yang durhaka. Kelompok ini cenderung tunduk dan patuh pada apapun yang diserukan pemuka agama.

Terakhir, kelompok pragmatik yang menggantungkan sikapnya pada kepentingan atau nilai guna. Covid-19 diterima dan disikapi hanya jika bersinggungan dengan kepentingan atau terdapat sesuatu

yang dinilai menguntungkan. Dampak Covid-19 yang luar biasa menjadikan mereka sedemikian peduli dengan upaya pencegahan Covid-19. Mereka mematuhi protokol kesehatan karena tidak ingin terpapar Covid-19 dan berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

Telaah epistemologis respon publik terhadap pandemi Covid-19 berimplikasi pada strategi pemerintah dalam mengupayakan pengentasan pandemi Covid-19. Setiap analisis mempolakan strategi tertentu yang bisa diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan diperlukan tindakan komprehensi yang melibatkan perangkat epistemologis agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

B. Saran

Penelitian ini mengambil perspektif epistemologi dalam menganalisis objek material yakni respon publik menanggapi atau menyikapi pandemi Covid-19. Epistemologi sendiri merupakan salah satu cabang utama filsafat. Maka penelitian lain yang dapat dilakukan di kemudian hari adalah memperluas cakupan objek formal penelitian dengan melibatkan cabang-cabang filsafat lain atau menggunakan perspektif berbeda dalam menganalisis objek material.

Objek material dalam penelitian ini juga dapat diperluas dengan memasukkan aspek lain terkait

pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan topik yang hangat dan aktual. Topik ini memungkinkan ditemukan kebaruan dalam penelitian. Pembahasan tentang Covid-19 diharapkan akan sangat membantu upaya mengantisipasi Covid-19 sekaligus menambah wawasan dan memperkaya khazanah pengetahuan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Berbagai Respon Masyarakat Terhadap Covid-19. 2020. <https://19/berbagai-respon-masyarakat-terhadap-covid-19/>.
- Binti Awan, Fauziah. 2020. “Respon Terhadap Corona”. <http://iainkendari.ac.id/content/detail/respon-terhadap-corona>.
- Choirunnisa, Sulistya. 2020. “Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam Perspektif Filsafat Ilmu”. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, ISSN 2354-9033. Hal. 536-546.
- Empat Respon Masyarakat Terhadap Virus Corona dari Cuek hingga Menolak Fakta <https://www.radarcirebon.com/2020/07/05/empat-respon-masyarakat-terhadap-virus-corona-dari-cuek-hingga-menolak-fakta/%3famp>.
- Gallagher, Kenneth T. 1994. *Epistemologi*, terj. P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius.

Gitiyarko, Vincentius. 2020.”. Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020.” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>.

Gitiyarko, Vincentius, 2020. “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19.” <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>

Hospers, John. 1967. *An Introduction to Philosophy Analysis*, 2nd ed. London: Prentice Hall Inc.

Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritikanya, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya/full&view=ok>.

Keraf, Sonny dan Mikhael Dua. 2001. *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.

Kerwanto. 2020. “Covid-19 Ditinjau dari Epistemologi Tafsir Sufi” *Jurnal Bimas Islam*, Vol 13 No. 2, ISSN 2657-1188. Hal. 371-402.

Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan. 2020.

<https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html>.

Moeldoko: RS Jangan Mudah Mengcovidkan Pasien Meninggal. 2020.

<https://www.gatra.com/detail/news/91776/kesehatan/moeldoko-rs-jangan-mudah-mengcovidkan-pasien-meninggal#>.

Mustofa, Muhammad. 2020. “Epistemologi Seputar Covid-19: Menakar Sumber Informasi”.
<https://nasional.sindonews.com/read/33847/15/epistemologi-seputar-covid-19-menakar-sumber-informasi-1589760329>.

Patrick, Jonathan. 2020. “Analisa Tudingan Stigma Negatif Tenaga Kesehatan hingga PKI”.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200616193211-192-514022/analisa-tudingan-stigma-negatif-tenaga-kesehatan-hingga-pki>.

Perilaku Masyarakat Semakin Positif Hadapi Pandemi Covid-19. 2020.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read314739/perilaku-masyarakat-semakin-positif-hadapi-pandemi-covid-19>.

Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19. 2020.
<http://nasional.kompas/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?amp=1&page=2>.

Pranarka, A. M. W. 1987. *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar*. Jakarta: CSIS.

Publik Panik soal Korona, Ombudsman: Informasi dari Pemerintah Belum Komprehensif, 2020,
<https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/03/04/publik-panik-soal-korona-ombudsman-informasi-dari-pemerintah-belum-komprehensif>.

Ramadhan, Fitra Moerat. 2020. Jangan Abaikan 5 Gejala ini, Bisa Jadi Anda Terinfeksi Covid-19.
<https://grafis.tempo.co/read/2434/jangan-abaikan-5-gejala-ini-bisa-jadi-anda-terinfeksi-covid-19>.

Rappoport, A. S. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat*, terj. Susanti. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.

Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April, 2020,
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>.

- Sudarminta, J. 2002. *Epistemologi Dasar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Surajiyo. 2008. *Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suriasumantri, Jujun. 2007. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pancaranintan Indahgraha.
- Titus, Harold.et.al., 1979. *Living Issues in Philosophy*, Seventh Edition, New York: D. Van Nostrad Company.
- Van Peurseem, C. A. 1991. *Orientasi di Alam Filsafat*, terj. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia
- Yuliana, "Coronavirus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hal. 187-192.

